

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

ADE IRMA
1920050009



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

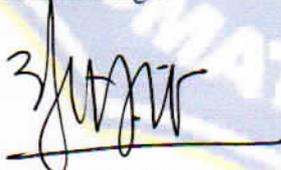
Nama : Ade Irma
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920050009
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Study Kasus pada
Pemerintah Kabupaten Asahan)

Pengesahan Tesis

Medan, 30 Desember 2021

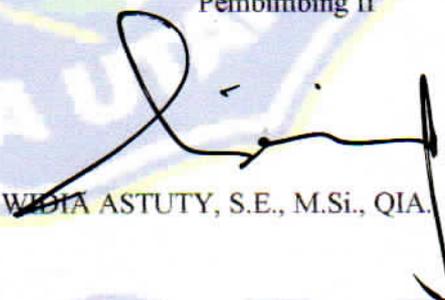
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II



Dr. WEDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.CPA.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY S.H. M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

PENGESAHAN

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Study kasus pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)**

ADE IRMA

NPM. 1920050009

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Komisi Penguji Yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammad Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021

Komisi Penguji

1. Dr. IRFAN, S.E., M.M

1.....

Penguji I

2. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

2.....

Penguji II

3. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

3.....

Penguji III



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Handwritten signatures of the three examiners are present next to their respective names and numbers.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ade Irma
Tempat Tanggal Lahir : Kisaran, 14 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Asrama Yonif Para Raide 330 Tri Daharma Kostrad, Bandung, Jawa Barat

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Alm. Marlan
Nama Ibu : Sari Yanti
Alamat : Jl. Akasia Blok XI gang Lancang Kuning II, Kisaran Sumatra Utara

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

1995 - 1996 : TK Dharma Wanita
1996 - 2002 : SD Taman Pendidikan Islam
2002 - 2005 : SMP S Taman Siswa Kisaran
2005 - 2008 : SMA S Taman Siswa Kisaran
2012 - 2017 : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan (STIE -MA)
2019- 2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Saya buat dengan sebenar-benarnya

Medan 20 Juli 2023
Penulis

Ade Irma
NPM :1920050009

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

ADE IRMA
NPM : 1920050009



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGANKOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

ADE IRMA
NPM : 1920050009

Tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara tranparansi terhadap kinerja Pemerintahan pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintahan pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode Asosiatif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebsar 112 orang yang di wakili oleh Kepada Dinas, Kasubag Umum, Serta Bendahara dari Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Asahan. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Statistik yang digunakan adalah *Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS)*. *Software* untuk mengolah data penelitian ini menggunakan *SmartPLS*. Berdasarkan hasil penelitian transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah, Komitmen Organisas.

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND
CLARITY OF BUDGET TARGETS ON THE PERFORMANCE OF
GOVERNMENT AGENTS WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AS MODERATING VARIABLE
(Case Study on Asahan District Government)**

**ADE IRMA
NPM : 1920050009**

The objectives of this study are: to determine and analyze the effect of transparency on the performance of the government in Asahan Regency. To find out and analyze the effect of accountability on the performance of the government in the government in Asahan Regency. To find out and analyze the clarity of budget targets that affect the performance of the government in the government in Asahan Regency. To find out and analyze organizational commitment to moderate the relationship between transparency and government performance in government in Asahan Regency. To find out and analyze organizational commitment to moderate the relationship between accountability and government performance in the government in Asahan Regency. To find out and analyze organizational commitment to moderate the relationship between clarity of budget targets and government performance in Asahan Regency. This study uses the Associative method, using a quantitative approach. The population and sample in this study were 112 people who were represented by the Office, Head of General Subdivision, and Treasurer from Government Agencies in Asahan Regency. The data analysis of this research used quantitative data analysis techniques. The statistic used is Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS). Software to process this research data using SmartPLS. Based on the results of research transparency has a significant effect on the performance of government agencies. The clarity of budget targets has a significant effect on the performance of government agencies. Accountability affects the performance of government agencies. Organizational commitment can moderate the effect of transparency on the performance of government agencies. Organizational commitment can moderate the effect of clear budget targets on the performance of government agencies. Organizational commitment can moderate the effect of accountability on the performance of government agencies.

Keywords : Transparency, Clarity of Budget Targets, Accountability, Performance of Government Agencies, Organizational Commitment.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tesis dengan judul "**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)**" dengan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan Tesis ini, orang tua yang selalu mendukung kelancaran tugas saya.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan gelar (M.Ak). Dalam tesis ini akan dibahas mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas serta Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Asahan. Tesis ini dianjurkan untuk dibaca oleh semua mahasiswa pada umumnya sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman.

Di dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan laporan tesis penulis. Serta Kedua orang tua, Alm. Bapak tersayang Alm. Marlan dan Ibunda tercinta Sari Yanti yang telah memberikan segala kasih sayangnya, Taklupa saya juga mengucapkan terimakasih kepada suami saya tercinta Praka Ardiansyah Damanik yang banyak memberikan dukungan moril memberikan semangat/motivasi tersendiri dalam penyelesaian tesis ini. Kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis. Semoga Allah membalas segala kebaikan orang-orang baik di sekelilingku Aamiinn

Penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Bapak Prof Dr.Agussani, M.AP,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Triono Eddy S.H., M.Hum.,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. **Ibu Dr. Eka Nurmala Sari S.E., M.Si., AK., CA.,** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta selaku dosen pembimbing 1 (Satu) Tesis penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Ibu Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE., M.Si,Ak.,CA.,** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Dr. Widia Astuty SE., M.Si., QIA., AK. CA., CPA.,** selaku dosen pembimbing 2 (Dua) Tesis penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada Penguji 1 (satu) **Ibu Maya Sari, SE, M.Si , Ak.,** dan **Bapak Dr. Irfan, SE, MM.,** Penguji 2 (dua) **Ibu Dr. Zulia Hanum, SE,M.Si** dan Penguji 3 (tiga) **Dr. Syafrida Hani SE, M.Si** yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan Tesis ini.
7. Bapak/ibu Kepala Dinas, Sekertaris, Kabid, Kasubag dan Seluruh Staf pada Pemerintahan di Kabupaten Asahan yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
8. Buat Kakak, abang dan Adik saya Susanti, Benno Susanto, Kristina Dalimunte, Indra Buana Putra, Achmad Syarif, Zery Niana Puspa Sari, Syamsul Bahri, Fitriani Marpaung, Kurniawan Alfat, Nurul Humairoh dan Almira Chantika Shocie yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
9. Teman-Teman Tercinta Mahasiswa Magister Akuntansi Angkatan 2019. Teman teman kelas Akuntansi Sektor Publik Eka Anggraini, Raisha Amin yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran sepatah kata pengantar tesis ini.

Medan, Desember 2021

Penulis

ADE IRMA

NPM : 1920050009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang`	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Kinerja Instansi Pemerintahan	16
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	16
2.1.2 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
2.1.3 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
2.2 Transparansi.....	19
2.2.1 Pengertian Transparansi dan Azas Transparansi.....	19
2.2.2 Penerapan Prinsip Transparansi	23
2.2.3 Transparansi Publik.....	25
2.2.4 Indikator Transparansi.....	26
2.2.5 Perwujudan Nilai transparansi	27
2.3 Akuntabilitas.....	28
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	28

2.3.2 Prinsip Akuntabilitas	30
2.3.3 Manfaat akuntabilitas	31
2.3.4 Indikator Akuntabilitas	32
2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran	32
2.4.1 Pengertian Anggran	32
2.4.2 Pengertian Kejelasan sasaran Anggran	35
2.4.3 Kriteria dan indikator Kejelasan sasaran Anggaran	36
2.4.4 Tujuan Kejelasan sasaran anggran	36
2.5 Pengertian Komitmen Organisasi.....	37
2.5.1 Karakteristik Komitmen Organisasi	38
2.5.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi .	39
2.5.3 Indikator Organisasi	41
2.6 Penelitian Yang Relevan	43
2.6.1 Kerangka Konseptual	47
2.6.2 Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	50
3.3 Populasi Dan Sampel	51
3.4 Defenisi Operasional Variabel	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Hasil Penelitian	66
4.1.1 Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan.....	66
4.1.2 Tingkat Pengembalian Responden.....	65
4.1.3 Deskripsi Data Responden.....	66
4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian	68

4.2 Analisis Data.....	74
4.2.1 Hasil Pengujian SEM-PLS	74
4.2.1.1 Analisis Outer Model	77
4.2.1.2 Analisis Iner Model	81
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis	81
4.2 Pembahasan Penelitian.....	83
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat. Peran pemerintah sebagai lembaga publik yaitu masyarakat meminta untuk mengelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi secara terbuka serta mengawasi proses manajemen keuangan yang andal serta adanya manajemen anggaran yang baik. Pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat

Dengan era perkembangan zaman, sektor publik yang ada di Indonesia saat ini muncul tuntutan terkait penggunaan informasi keuangan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tuntutan tersebut yaitu perlunya transparansi bagi publik maupun pemerintah, pemberian informasi kepada publik yang didasarkan pada pemenuhan hak publik. Menurut Sanjaya, dkk., (2014), kurangnya pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan untuk saat ini juga menyebabkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan suatu kegiatan program, kebijaksanaan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi dan visi sebuah organisasi yang tertuang dalam perumusan skema organisasi, dalam hal lain kinerja juga dapat disebut sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja instansi pemerintahan dapat diartikan sebagai

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

Berdasarkan perwujudan dari kinerja satuan perangkat daerah, baik pegawai maupun staf dapat di wujudkan melalui hasil kerja keras, karakter yang spesifik maupun ketepatan waktu yang dicapai serta relevan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada para *stakholder*. Adapun bentuk pertanggung jawaban yang harus di berikan atas kinerja instansi pemerintahan yaitu Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimana adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi diinstansi masing-masing.

Undang – Undang No.17 Tahun 2003 pada rancangan undang – undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah yakni prestasi yang dicapai oleh pengguna anggran sehubungan dengan anggaran yang digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja harus secara relevan sesuai dengan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil outcomes dari setiap program. Secara terinci dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara) terdapat perubahan orientasi dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan orientasi tersebut adalah pemerintahan dijalankan berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*), bukan pada input (lebih spesifik anggaran). Program dan kegiatan pemerintahan harus mengacu pada hasil yang akan dicapai. Untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut baru disusun anggaran yang dibutuhkan.

Pengukuran kinerja mempunyai banyak manfaat bagi organisasi. Meskipun terdapat sedikit bukti efektivitasnya, sistem pengukuran kinerja terus diimplementasikan yang didasarkan pada asumsi bahwa sistem pengukuran kinerja ini akan mempunyai dampak positif terhadap kinerja (Bourne, Kennerley & Franco-Santos, 2005). Hatry (1999) mengemukakan pengukuran kinerja berhubungan dengan aktivitas evaluasi lainnya yaitu evaluasi program dan studi mendalam lainnya, hubungan dengan audit kinerja, dan perencanaan strategis, penganggaran, dan analisis kebijakan. Pengukuran dan pelaporan kinerja bermanfaat untuk meningkatkan program dan akuntabilitas.

Dalam instruksi presiden republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; dan (8) *strategy vision* (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000).

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai cara dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan telah diterima secara umum. Untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik, maka diperlukan sistem pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance*.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan informasi yang relevan dan transparan dalam hasil dari kegiatan maupun program yang telah di rencanakan maupun dilaksanakan. Pada saat ini masyarakat pusat hanya memperhatikan serapan anggaran dan laporan anggaran yang baik, seharusnya juga seimbang dalam memperhatikan kinerja instansi pemerintah. Pada kinerja instansi pemerintahan indikator yang sangat di tonjolkan adalah bagaimana mencapai keberhasilan pada suatu tujuan dan sasaran pada sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan Pratama et.al (2019), Anjarwati (2012), Yulianti (2014) menyimpulkan bahwa Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Loina (2003) menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik pada umumnya haruslah transparan karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Melalui transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui seluruh rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila transparansi tidak diterapkan dalam suatu organisasi, maka dampak yang diterima pemerintah yaitu penyalahgunaan sumber daya sehingga mengakibatkan adanya ketidakefisien dalam alokasi sumber daya, terjadinya kecurangan atau penyelewengan tugas sehingga dapat menyuburkan praktik-praktik korupsi, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan khususnya dilingkungan organisasi sektor publik.

Agar pengelolaan anggaran dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif pada instansi pemerintahan maka transparansi memiliki beberapa indikator dimana sangat di butuhkan dalam

birokrasi organisasi sektor publik dalam pengelolaan sebuah anggaran pada instansi pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan dalam bentuk informasi yang dapat di akses oleh masyarakat, serta sebagai wujud bentuk dari pemerintahan yang baik sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan dalam bentuk informasi yang akurat pada sebuah instansi pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2010) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah guna untuk mewujudkan tata pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik. Pada dasarnya transparansi merupakan suatu bentuk dari pertanggung jawaban yang akan menjadi sebuah informasi yang di sampaikan terhadap publik sebagai bentuk dari wujud pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai dimana sebagai bentuk perwujudan dari etika yang dekat dengan administrasi publik yang dapat dipertanggung jawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek yang berasal dari administrasi publik atau pemerintahan. Menurut Astini et al (2014) Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang mempunyai arti yaitu proses penganggaran yang

dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga dapat benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas dapat dikatakan baik dan sejalan dengan transparansi apabila kewajiban para pemegang amanah pada instansi pemerintahan pada umumnya yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memberikan pertanggung jawaban, menyajikan laporan serta melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab oleh organisasi perangkat daerah pada instansi pemerintahan. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Agar menciptakan akuntabilitas serta transparansi dalam sebuah instansi pemerintahan anggaran merupakan hal yang terlewatkan dalam suatu pelaksanaan operasional organisasi sektor publik. Pengelolaan publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk sebaik-baiknya pelayanan publik yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja pada setiap instansi pemerintahan. Maka dari itu pengelolaan sebuah anggaran merupakan hal yang paling utama dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang relevan dan penting dalam lingkup pemerintahan karena berdampak pada akuntabilitas pemerintah.

Agar dapat tercapai akuntabilitas maka indikator seperti Informasi pengelolaan secara terbuka, cepat dan tepat, serta pertanggung jawaban terhadap publik harus menjadi faktor utama agar akuntabilitas menjadi hal yang diutamakan dalam sebuah kinerja. Penelitian Arifah (2007) melakukan penelitian pada unit SKPD di Karisidenan Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut menemukan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Dalam keberhasilan kejelasan sasaran anggaran maka diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan suatu pelaksanaan suatu anggaran akan menjadi bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam pekerjaannya, sebab anggaran suatu daerah harus dapat menjadi tolak ukur pencapaian sebuah kinerja kerja yang di harapkan. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

Indikator dari kejelasan sebuah anggaran juga terdapat pada tercapainya sebuah laporan keuangan atas setiap pelaksanaan program kegiatan pada sebuah instansi pemerintahan dengan tujuan agar tujuan dari anggaran yang dikeluarkan secara tepat sesuai dengansasaran yang prioritaskan. Herawaty (2011) meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kota Jambi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Dalam mengemukakan kinerja instansi pemerintahan yang baik menuju kepada transparansi dan akuntabilitas maka komitmen organisasi dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi di bandingkan kepentingan sendiri (Weiner, 2004:619) dalam Arifin (2012).

Dalam menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang baik dan memadai diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, skil yang mumpuni, serta pengalaman yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik yang dicapai oleh aparat pemerintah. Dan apabila hal tersebut diperkuat dengan adanya kinerja yang baik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, maka akan dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik, dan tentu akan tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai yang ditargetkan. Tinggi rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi (Siagian:2002). Komitmen organisasi dapat terwujud apabila individu

dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Ketika para kepala dinas mengejar kepentingan organisasi maka individu tersebut dalam penyusunan program kerja akan ikut berpartisipasi dalam menyusun program kerja dan anggaran agar dapat mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, dengan adanya pemoderasian tersebut dapat meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah.

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh kontijensi yang kuat pada pengaruh variabel independen terhadap dependen. Menurut Sugiyono (2016:90) variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian yang telah dilakukan oleh Zein (2016) tentang menunjukkan hasil bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, serta variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pemerintah Kabupaten Asahan mempunyai visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Asahan yang terarah, akuntabel dan transparan dengan misi diantaranya menciptakan sistem penyusunan anggaran *E-Government* yang terarah dan transparan, mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, menyusun laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan kabupaten Asahan secara tepat waktu. Tata kelola keuangan yang baik harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mewujudkan visi dan misi tersebut.

Berikut adalah data anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Asahan periode 2018-2020:

Tabel 1.1
Data Anggaran Belanja Kabupaten Asahan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5
2016	1.447.349.546.008	1.023.643.299.085	-423.706.246.923	70
2017	1.550.420.215.473	1.301.818.576.864	-248.601.638.609	83
2018	1.625.169.942.881	1.1122.734.437.069	-601.526.643.796	63
2019	2.467.952.757.114	1.374.968.274.136	-1.092.984.482.978	56
2020	2.7112.922.591.995	1.523.672.134.655	-1.212.250.457.340	56

Sumber :Kabupaten Asahan (2021)

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi belanja Kabupaten Asahan pada tahun 2018-2020 tidak mencapai 100% dan setiap tahunnya anggaran mengalami peningkatan sedangkan nilai realisasi setiap tahunnya tidak tercapai, sementara menurut Halim (2004 : 20) Analisis terhadap akuntabilitas belanja daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan tabel I-1 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2014-2016 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:493) bahwa Analisis terhadap belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi biaya dan anggarannya. Apabila realisasi anggaran belanja

daerah yang tidak melampaui anggaran (target) maka akuntabilitas dapat dinilai dengan baik”.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan belum berjalan dengan baik karena setiap tahunnya anggaran pendapatan yang disusun oleh manajemen mengalami peningkatan dan tidak sesuai penyusunan anggaran dengan realisasi yang dicapai, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan perencanaan belum menghasilkan kinerja manerial yang baik, sementara menurut (Hidayat, 2014) Perencanaan, yaitu penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akandatang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2010) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Seangkan Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020) Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Penganggaran Partisipatif berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja instansi

pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu dan fenomena yang terjadi, untuk itu peneliti tertarik melakukan penilitan berdasarkan pembahasan di atas dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATIG. (Study Kasus Pada Dinas Di Kabupaten Asahan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Realisasi belanja Kabupaten Asahan pada tahun 2014-2015 tidak mencapai 100%.
2. Tidak berjalannya dengan efektif program-program yang telah direncanakan dengan realisasi kegiatan yang ditetapkan.
3. Rendahnya penyerapan anggaran dan tidak maksimalnya sasaran kegiatan program yang menggunakan dana APBD
4. Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan *complicated*, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara tranparansi terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Pemerintahan pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara tranparansi terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan
5. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan

6. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Asahan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini secara garis besar penulis kelompokkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah transparansi dan akuntabilitas terhadap kejelasan sasaran anggaran yang ada pada Dinas di pemerintahan Kabupaten Asahan sesuai dengan anggaran yang di kelola oleh individu, staf, maupun anggota dalam mengelola anggaran telah dilakukan dengan baik melalui komitmen organisasi yang di terapkan pada pemerintahan Kabupaten Asahan

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama pada masa yang akan datang

3. Bagi Penelitian Lain

Bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi serta berguna juga untuk dapat digunakan oleh referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap kajian teori, kutipan dari pengaruh transparansi, akuntabilitas terhadap sasaran anggaran melalui kinerja pemerintah sebagai komitmen organisasi sebagai variabel moderating sebagai bentuk dari kinerja Inastansi pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

2.1 Kinerja Instansi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai suatu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan , misi dan visi sebuah organisasi. Secara garis besar dapat di artikan kinerja merupakan suatu proses ataupun kegiatan umpan balik atas kinerja masa lalu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang bagi proses yang berkelanjutan. Maksum (2013) memaparkan kinerja merupakan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran , tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja pemerintah merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebuah instansi pemerintahan sebagai penjabaran visi dan misi dan strategi pemerintah yang mendikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan kegiatan dengan program yang telah ditetapkan. Dalam kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dengan cara pengukuran suatu kinerja yang dilakukan untuk membantu para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan serta mencapai tujuan dan membantu masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan yang diberikan pemerintah. Menurut Maksum (2013) indikator kinerja merupakan suatu pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan

menghitung indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*) hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

2.1.2 Pengertian Instansi Pemerintah

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas. Instansi pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil unsur yang berkedudukan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan merata. Pegawai Negeri Sipil harus bersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Instansi Pemerintah mencakup perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik

Dalam sebuah organisasi instansi pemerintahan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada setiap instansi pemerintahan daerah. Setiap instansi harus mempunyai sikap serta bekerja dengan cara efektif, efisien dan produktif karena individu (manusia) merupakan faktor utama yang dimana karena manusia adalah sebagai penggerak inovasi yang akan direalisasikan dalam upaya mewujudkan tujuan dari instansi pemerintahan. Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi adalah dengan menanamkan jiwa disiplin mulai dari pimpinan dengan tujuan memberikan contoh kepada bawahan, dengan demikian suatu kinerja pegawai dapat meningkat. Dengan adanya disiplin yang ditamamkan diharapkan setiap pegawai memiliki kinerja yang baik agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi sehingga tercapainya tujuan instansi.

2.1.3 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

MenPAN(2007) menyatakan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam PP No 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 112 menyatakan kinerja instansi pemerintahan adalah keluaran dari hasil kegiatan atau program yang akan atau yang dicapai yang sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas atau kualitas yang terukur.

Bastian (2010:274) dalam Auditya, Lucy dkk (2013), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja.

2.2 Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi dan Azas Transparansi

Salah satu karakteristik terciptanya good goernance pada sebuah pemerintahan yakni dengan terwujudnya asas transparansi, Asas transparansi perlu dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pelaksanaan suatu pemerintahan mempunyai asas keterbukaan dalam memberi dan menerima sebuah informasi, selain itu transparansi juga dapat menjadi pencegah sebuah tindakan korupsi yang mungkin akan dilakukan oleh oknum – oknum yang mempunyai kepentingan pribadi. Transparansi yang diuraikan menurut Sumarmo (2009) adalah segala sesuatu berupa kegiatan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara terbuka. Dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah maka seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan transparansi pada pemerintahan maka perwujudan transparansi banyak di dukung oleh media masa yang mempunyai peran yang sangat penting misalnya dalam penyampaian informasi yang relevan maupun

prilaku yang meyimpang dalam penyampaian laporan keuangan pada sebuah birokrasi, untuk memicu hal yang demikian terjadi maka media membutuhkan kebebasan pers dalam keterbukaan serta konsekwensi yang akan dihadapi apabila informasi yang dipublikasikan harus sesuai dengan laporan yang diberikan, sehingga informasi yang di konsumsi oleh publik dapat di nikmati dengan cara yang terbuka ataupun yang menyebabkan informasi tersebut tidak dapat di minati oleh masyarakat atau publik secara luas.

Annisaningrum (2010) mengatakan transparasi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwasannya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya serta ketaatan dalam peraturan perundang – uandangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam menuju pada asas transparansi memiliki beberapa krtiteria antara lain yaitu:

- a. Pertanggung jawaban yang terbuka
- b. Adanaya aksestabilitas terhadap laporan keuangan
- c. Adanya publikasi laporan keuangan dan
- d. Hak untuk tau hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja

Menurut Werimon et.al (2007) Prinsip transparansi meliputi 2 aspek yakni :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi dimana pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.

2. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Werimon et.al (2007) juga mengemukakan bahwa kerangka dalam membangun transparansi pada organisasi sektor publik memiliki empat komponen yang terdiri dari (1) sistem pelaporan keuangan (2) sistem pengukuran kinerja (3) dilakukannya auditing sektor publik (4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik. Transparansi dalam pengelolaan sebuah anggaran yang di rancang oleh pihak eksekutif dapat dikatakan transparansi apabila terdapat kebijakan dalam mengumumkan anggaran, adanya dokumen atas anggaran, serta mudahnya mengakses setiap anggaran yang telah di keluarkan serta tersedianya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. Sehingga dapat di simpulkan bahwa semakin transparan dalam kebijakan publik yang di lakukan pemerintahan dalam hal APBD maka semakin meningkatkan kepercayaan terhadap publik dalam pengelolaan sebuah anggaran.

Menyikapi tentang transparansi serta akuntabilitas dalam keuangan publik tertulis pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik harus di susun harus sesuai dan memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Saleh dan Rochmansjah (2010) dalam Iskandar (2014).

Pada dasarnya transparansi merupakan suatu proses keterbukaan sebuah informasi dalam sebuah penyelenggaraan pada pemerintahan yang di butuhkan oleh *stakeholder* pada setiap pemerintahan daerah, dengan tujuan agar terwujudnya komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tertera dalam pasal 2 yang berbunyi (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna Informasi publik (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu , biaya ringan , dan dengan cara yang sederhana (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang Keadilan dan kepentingan umum.

Keterbukaan yang pada umumnya menjadi bentuk perwujudan dari transparansi merupakan sebuah keterbukaan terhadap informasi yang dilakukan secara terstruktur dan memadai untuk dapat mempermudah memahami sebagai alat monitoring terhadap evaluasi hasil kinerja organisasi terhadap sebuah anggaran pada pemerintahan daerah. Pentingnya *stakeholder* dalam mengawasi jalannya sebuah kegiatan dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh para OPD dalam setiap anggaran yang dikeluarkan harus dapat mempertanggung jawabkan sebagai wujud dalam pengembangan transparansi yang diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.2.2 Penerapan Prinsip Trnasparansi Dan Tujuan Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator yang paling utama dalam pengelolaan anggaran pada pemerintahan yang ditetapkan pemerintah dalam mencegah tindakan pidana korupsi serta dalam rangka mencegah tindakan korupsi yang dapat dilakukan oleh OPD pada instansi maupun organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses sebuah informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah *website* merupakan salah satu media pemerintah dalam penyedia informasi terhadap publik *Styles dan Tennyson (2007)* menyatakan bahwasannya internet merupakan media yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat mengefisienkan biaya sehingga mencapai efektifitas bagi pemerintah dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat. Penggunaan *website* dan teknologi informasi didalam pemerintahan tergambar dengan adanya penerapan yang mengacu pada strategi dan kebijakan terhadap pengembangan prinsip transparansi pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

Berkaitan dengan prinsip transparansi bahwasannya transparansi tak hanya mengenai hal keuangan saja akan tetapi dalam hal perencanaan pada anggaran juga terdapat prinsip transparansi yang meliputi 5 hal yaitu :

1. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen pendukung yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Keterbukaan prosedur (Dalam pengambilan keputusan, atau prosedur dalam penyusunan sebuah anggaran)
3. Keterbukaan register yang berisi fakta umum
4. Keterbukaan serta menerima peran dari masyarakat
5. Keterbukaan dimana masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya.

Menyikapi prinsip – prinsip transparansi dalam penencanaan sebuah anggaran pada pemerintah daerah maka Folscher (2000) dalam Medina (2012) mengungkapkan tentang keuntungan melakukan penerapan transparansi meliputi hal – hal berikut diantaranya

1. Transparansi dapat mengurangi ketidak pastian
2. Meningkatkan akuntabilitas
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

Meskipun banyak peraturan maupun perundangan yang menuju pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) pada hakikatnya tidak semua transparansi dijalankan oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penyebab lain adalah belum dilakukannya pengukuran dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan terhadap kinerja daerah.

Dalam Pengelolaan keuangan serta anggaran yang bersumber pada anggaran pemerintah daerah maka pemerintah harus memulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban terhadap program dan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan dari transparansi antara lain yakni :

1. Menyediakan informasi keuangan secara terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance*)
2. Diperlakukannya reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara.
3. Penerapan otonomi daerah seutuhnya yang membawa konsekwensi logis yang berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.
4. Penyusunan anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) yang objek dan berkualitas.

2.2.3 Trasnparansi Publik

Menurut Andrianto (2007) pengertian transparansi publik adalah suatu keterbukaan yang secara sungguh – sungguh, meyeluruh hingga memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara maupun organisasi dapat di akses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi. Lain pula dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwasannya transparansi publik merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada undang – undang.

Dalam penerapan good corporate governance merupakan bagian dari perwujudan transparansi, Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi dibangun atas arus sebuah informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan lembaga – lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia dan dipantau agar dapat dimengerti.

Transparansi publik merupakan suatu tugas yang pelaksanaannya yang bersifat secara terbuka bagi masyarakat, yang melalui dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dengan adanya transparansi publik maka setiap informasi yang diperoleh secara akurat dan faktual dapat digunakan untuk (1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai adanya tindakan korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait (4) mengetahui hak dan kewajiban masing – masing pihak, yaitu antara manajemen sektor publik dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait (Mahmudi 2010).

2.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) prinsip dari transparansi mengacu pada indikator – indikator yang meliputi: a. Komunikasi publik terhadap pemerintah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab yang menyusun suatu

mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pemerintah membayar uang suap.

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi yaitu bahwasannya kemudahan akses informasi dalam meningkatkan arus informasi melalui kerjasama yang baik dengan media masa atau pun lembaga non pemerintahan.

2.2.5 Perwujudan Nilai Transparansi

Dalam menciptakan perwujudan nilai transparansi pada instansi pemerintahan daerah maka terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan agar transparansi dapat terwujud dengan baik. Perwujudan transparansi ini dapat menunjang kinerja pada instansi pemerintahan dalam menjalankan dan mewujudkan bahwasannya anggaran yang di kelola pada pemerintah daerah sesuai dengan tujuan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan pencapaian sebuah anggaran sebagai bentuk terhadap pertanggung jawaban atas perwujudan nilai transparansi.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi di antaranya (1) mengidentifikasi peran masyarakat yang menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus untuk mendorong partisipasi publik. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga dapat terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (2) Meningkatkan peran lembaga eksternal yang memiliki fungsi sebagai badan dalam mengawasi pelayanan terhadap publik, sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi dalam pelayanan publik yang kurang optimal terhadap masyarakat. (3) Komitmen Pemerintah yakni pejabat publik yang dapat menjadi

serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan terhadap publik, dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses setiap informasi yang di sajikan.

Dengan demikian maka dalam perwujudan nilai transparansi maka transparansi seyogyanya tidak dapat berjalan begitu saja tanpa di dukung oleh komitmen antara pemerintah dengan masyarakat atau publik yang didasarkan pada fungsi dari transparansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan keterlibatan maupun partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat di artikan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban yang mengacu kepada sebuah organisasi (pekerja atau individu) yang bertanggung jawab atas organisasi, atau dapat disebut juga kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk dapat memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang diberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Mardiasmo (2000) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

Pendapat lain dari Lembaga administrasi negara bahwasannya akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban, serta melengkapi dan

menjelaskan kinerja tindakan dari orang (individu) atau badan hukum dan pimpinan kolektif dari sebuah organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas yang mengharuskan seseorang harus bertanggung jawab atas kegiatan maupun kualitas performansinya dalam menyampaikan tugas untuk mencapai tujuan sebagai tanggung jawabnya. Hamid (2007, Hal 136) mengemukakan pendapatnya bahwa akuntabilitas kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2000) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat di pandang dari berbagai perspektif akuntansi sebagai suatu entitas pemerintahan yang dapat di bagi menjadi 4 kelompok di antaranya :

1. Sumber Daya Financial
2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan, manfaat dan efektifitas.

Berdasarkan hasil perspektif sistem akuntabilitas mempunyai beberapa karakteristik yang di uraikan oleh Mardiasmo (2006) yaitu :

1. Berfokus pada hasil akhir
2. Menggunakan beberapa indikator yang dipilih untuk pengukuran beberapa kinerja

3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil dan mempublikasikannya ke publik secara teratur.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas yang menggambarkan pengertian secara umum bahwasannya publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan – kebijakan yang dapat di ambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Sebagaimana akuntabilitas mempunyai instrumen untuk kegiatan control terutama untuk pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diawali mulai dari penyusunan program pelayanan publik , pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak sesuai dengan sasaran tujuan.

2.3.2 Prinsip Akuntabilitas

Pada Dasarnya akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai – nilai atau norma – norma eksternal yang dimiliki oleh direct users yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Loina, 2003). Prinsip akuntabilitas berdasarkan LAN dan BPKP (2004:43) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah harus di perhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Harus adanya komitmen dari seluruh staf dan instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel

2. Suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang – undangan yang telah di tetapkan
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus memiliki sikap jujur, transparan, objektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusun laporan akuntabilitas.

Sedangkan prinsip –prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja (AKIP) harus di susun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Maka lembaga administrasi negara republik indonesia menerbitkan pedoman penyusunan n pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didalamnya memuat beberapa prinsip lagi yang juga harus diperhatikan, diantaranya :

- a. Prinsip Lingkungan Pertanggung jawaban
- b. Prinsip Prioritas
- c. Prinsip Manfaat

2.3.3 Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan akuntabilitas pada sebuah organisasi sektor publik agar dalam hal ini sektor pemerintahan dapat memeberikan beberapa manfaat yaitu :

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi

- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Waluyo, 2007:182)

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Halim (2012:34) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Informasi pengelolaan secara terbuka, cepat dan tepat
- b. Pelayanan yang memuaskan bagi publik
- c. Partisipasi publik
- d. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kebijakan publik
- e. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan.

2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.4.1 Pengertian Anggaran

Anggaran (*budget*) adalah suatu alat penting dalam perencanaan maupun pengendalian sebuah manajeme yang dinyatakan dalam suatu ukuran financial

tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu yang relatif singkat. Anggaran merupakan alat motivasi pegawai. Menurut Dedi (2008) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Dalam penyusunan rencana kerja masing – masing program harus memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Keterlibatan semua unsur suatu organisasi dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Pinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja menurut Halim (2007) adalah :

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran diwajibkan dan diharuskan memberi suatu informasi yang sesudadai mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari suatu program kerja yang telah disahkan dan dianggarkan.
- b. Disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi dalam pengeluaran belanja.
- c. Keadilan anggaran, pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil supaya dapat dinikmati oleh masyarakat secara

menyeluruh tanpa adanya diskriminasi maupun perbedaan dalam pemberian pelayanan karena pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan

- d. Efisiensi dan efektifitas anggaran. penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya harus dapat di pertanggungjawabkan
- e. Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output* atau *outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen penyusunan anggaran daerah yang disampaikan oleh masing - masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus sungguh -sungguh dalam menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan, bahwa tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria yaitu Spesifik, Terukur, Menantang tapi realistis, Memiliki batas waktu.

2.4.2 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut. Putra (2013) mengemukakan kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut

dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

1. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadibingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009)
- 3 Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satu diantaranya yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan OPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah
- 4 Menurut Bastian (2010), “Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”, kemudian menurut Locke dalam Kurnia (2004) mengatakan bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas

2.4.3 Kriteria Dan Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Peningkatan kepuasan kerja terhadap anggaran dan pencapaian kinerja yang baik terhadap sasaran dan kejelasan anggaran memiliki 5 kriteria yaitu :

1. Spesifik
2. Terukur
3. Menantang tapu realistis
4. Berorientasi pada hasil akhir
5. Memiliki batas waktu

Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Putra (2013) agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan :

1. Tujuan, membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur.
3. Standar, menentukan standar/target yang dicapai.
4. Jangka waktu, menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.

Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnyaKoordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

2.4.4 Tujuan Kejelasan Sasaran Anggaran

Abdullah (2012) dan Nuraini dan Indudewi (2012) mengungkapkan bahwasannya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan seluruhnya berpengaruh terhadapAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP). Singkatnya waktu perancangan anggaran pada instansi Pemerintah menyulitkan dalam pengambilan kebijakan untuk menjalankan fungsi anggaran secara maksimal, sehingga sangat rentan terjadi kesalahan,

ketidaktepatan sasaran, dan mengacu pada program tahun sebelumnya yang tidak kontekstual dengan kebutuhan mendatang. Pengukuran capaian kinerja dalam (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) LAKIP dilakukan dengan metode *Performance Gap*, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kegiatan meliputi input, output, outcome, benefit, dan impact yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan, namun pengukuran indikator benefit dan impact relatif sulit dilaksanakan.

2.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan dorongan seseorang untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi. Komitmen organisasi dapat di sebut juga sebagai perwujudan dari perilaku penting yang dapat digunakan sebagai penilaian atas kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi adalah proses identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap suatu organisasi. Menurut Griffin (2004) komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal dan terkait pada organisasinya. Sedangkan menurut Mathis (2001) komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, adalah suatu sikap tentang kesetiaan karyawan kepada organisasi mereka dan suatu proses

berkelanjutan dimana anggota organisasi menyatakan perhatian mereka kepada kesejahteraan dan kesuksesan organisasi selanjutnya.

Secara singkat pada intinya definisi komitmen organisasi di atas mempunyai penekanan yaitu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dan kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggungjawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja.

2.5.1 Karakteristik Komitmen Organisasi

Dalam komitmen organisasi terdapat beberapa karakteristik yang menggambarkan pola perilaku dalam komitmen organisasi Wiener dan Gechman (1977) dalam Ugboro (2006:236) berpendapat bahwa karakteristik berorganisasi meliputi :

1. Harus mencerminkan pengorbanan pribadi yang dibuat untuk kepentingan organisasi
2. Harus menunjukkan ketekunan, yaitu perilaku yang tidak boleh bergantung terutama pada lingkungan
3. Harus menunjukkan pribadi yang senang dengan organisasi, seperti mencurahkan banyak waktu untuk pribadi organisasi yang terkait dengan tindakan dan pikiran

Menurut Kaswan (2012), komitmen organisasi bersifat multi dimensi dan ciri-ciri komitmen dikelompokkan menjadi sepuluh, antara lain:

1. Berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi.
2. Selalu mencari informasi tentang organisasi.
3. Selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi.
4. Memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berkembang.
5. Berpikir positif terhadap kritik dari teman.
6. Selalu berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan
7. Menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya.
8. Selalu mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi.
9. Menaruh perhatian pada hubungan kerja antar unit organisasi.
10. Tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik.

2.5.2 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut Dyne dan Graham (2005) yang dapat diuraikan sebagai berikut : (tesis exan)

1. Personal
 - a) Ciri – ciri kepribadian tertentu yang meliputi : Teliti, *ekstrovert*, mempunyai pandangan yang positif serta optimis dalam mewujudkan tujuan kelompok (organisasi) dari pada tujuan sendiri serta individu yang altruistik (senang membantu) akan cenderung lebih komit.

- b) Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan dalam sebuah organisasi maka semakin banyak harapan yang mungkin tidak dapat diakomodir, sehingga komitmennya semakin rendah.
- c) Usia dan masa kerja yang berhubungan dengan komitmen organisasi.
- d) Keterlibatan dalam bekerja yang dimana kerja individu berhubungan dengan komitmen organisasi pada instansi terkait.

2. Situasional

- a) Nilai (value) tempat kerja dimana suatu hubungan kritis yang saling berkaitan. Dalam mewujudkan nilai-nilai kualitas, inovasi, kooperasi, partisipasi, dan trust akan mempermudah setiap pegawai untuk saling berbagi dan membangun hubungan erat. Jika para pegawai percaya bahwa nilai organisasinya adalah kualitas produk jasa, para pegawai akan terlibat dalam perilaku yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan hal itu
- b) Karakteristik Pekerjaan dimana Karakteristik spesifik dari pekerjaan dapat meningkatkan tanggung jawab, serta rasa keterikatan terhadap organisasi
- c) Dukungan Organisasi sebagai bentuk sebagai sejauh mana pegawai memersepsi bahwa organisasi (lembaga, pimpinan, rekan) memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan mengapresiasi pegawai dalam pekerjaan yang dilakukannya dimana kesejahteraan pegawai dan juga menghargai kontribusinya dalam melakukan setiap pekerjaannya
- d) Keadilan organisasi sebagai perwujudan dalam keadilan maupun proses pengambilan keputusan, serta keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pimpinan terhadap pribadi.

3. Posisional

- a) Tingkat pekerjaan Status yang tinggi cenderung meningkatkan motivasi maupun kemampuan aktif terlibat.
- b) Masa kerja lama akan semakin membuat pegawai komit, hal ini disebabkan oleh karena semakin memberi peluang pegawai untuk menerima tugas menantang, otonomi semakin besar, serta peluang promosi yang lebih tinggi.

2.5.3 Indikator Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer (1997) mengemukakan Komitmen Organisasi bahwa ada tiga komponen komitmen organisasi, yaitu :

1. Affective commitment

Adalah penggabungan emosional yang positif sebagai suatu bagian dimana pegawai secara psikologis terkait dengan organisasi berdasarkan pada seberapa nyaman perasaannya dalam organisasi tersebut. Affective commitment merupakan proses perilaku dimana orang berfikir mengenai hubungan dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai individual akan secara langsung mempengaruhi keinginan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi

2. Continuance commitment

Adalah keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi, sebagai bagian dimana pegawai secara psikologis terikat dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi. Biaya yang dimaksud terdiri dari 2 hal yaitu :

- A. Masa kerja individu dalam organisasi yang mereka rasakan akan menumbuhkan loyalitas terutama dengan adanya program pensiun, senioritas, spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan keluarga yang akan merugikan mereka jika berpindah organisasi.
- B. individu bisa merasakan mereka berfikir untuk tetap tinggal dalam organisasi karena tidak punya alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

3. *Normative commitment*

Adalah keinginan seorang pegawai untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif pegawai mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini peneliti memberikan beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Apriani Erna Dupe Sri Ayem (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Penetapan SAP Barbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderenisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten)	kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan, Hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran akan sangat membantu pegawai dalam mencapai kinerja yang sangat diharapkan
2	Nurji Thatok Asmoni (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating	Bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
3	Novitasari Anggraeni (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas , Penganggaran Paerisifatif Terhadap Kinerja instansi pemerintah : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja instansi pemerintah Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja instansi pemerintah
4	Eka Nurmala Sari (2012)	Pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap good governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan)	Akuntabilitas berpengaruh terhadap Good Governance Besar pengaruh yang diberikan termasuk ke dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan good governance sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
5	Posumah Linda Natalia (2019)	Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran Transparansi dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manejerial pada pemerintahan Di Sulawesi Utara	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi dan Pengendalian Akuntansi secara menyeluruh berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

6	Fika Mudrikah, Karnila Ali (2020)	Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur)	Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan, tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah Komitmen organisasi memoderasi kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7	Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2018)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran , pengendalian akuntansi,dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Berdasarkan anggaran yang jelas dan dapat dimengerti harus disusun dengan baik sehingga pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat tercapai dengan baik. Melalui keterlibatan antara pimpinan dan stakeholders dalam penyusunan akuntabilitaskinerja pada instansi pemerintahan.
8	Tri Andiyani (2019)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap pada kinerja aparat pemerintah daerah, komitmen organisasi memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja aparat pemerintah daerah, sebagai interaksi partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi
9	Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, Junaidi (2020)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas , <i>Value For Money</i> terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik	Kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas dan value for money berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik
10	Muhammad Zein (2016)	Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintahan daerah Kabupaten Siak dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah, Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan saransasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
11	Fladimir Edwin Mbon (2014)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta	Transparansi (X1) Karateristik anggaran (X2) Akuntabilitas (Y)
12	Meria Solina (2015)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang	Partisipasi Anggarran (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Struktur Desentralisasi (X3) Akuntabilitas (Y)

13	Fladimir Edwin Mbon (2014)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta	Transparansi (X1) Karateristik anggaran (X2) Akuntabilitas (Y)
----	----------------------------	---	--

Dalam konsep pada organisasi sektor publik anggaran menjadi hal pokok yang menjadi salah satu target yang harus disusun dan sesuai dengan sasarannya yang menuju pada good govermace di suatu instansi pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan anggran. Sebagaimana Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (stakeholders), sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) dapat memimbulkan persepsi yang bersih dan berwibawa dalam penyusunan anggaran.

Transparasi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda dalam pengungkapannya maupun penyampaiannya. Sementara itu akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dapat menunjang kejelasan sasaran yang dilakukan dalam realisasi sebuah anggaran pada organisasi

pemerintahan. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kontrol antisipasi terhadap kegagalan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kinerja menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan kinerja yang dalam pengelolaan anggaran maka komitmen organisasi sangat diperlukan dalam pengelolaan anggaran, dengandemikian tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh (Mulyadi AR dan Samsidar 2018) . Hasil penelitian yang menyatakan sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintahan Di Aceh, selain itu kejelasan sasaran anggaran juga secara persial berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Aceh.

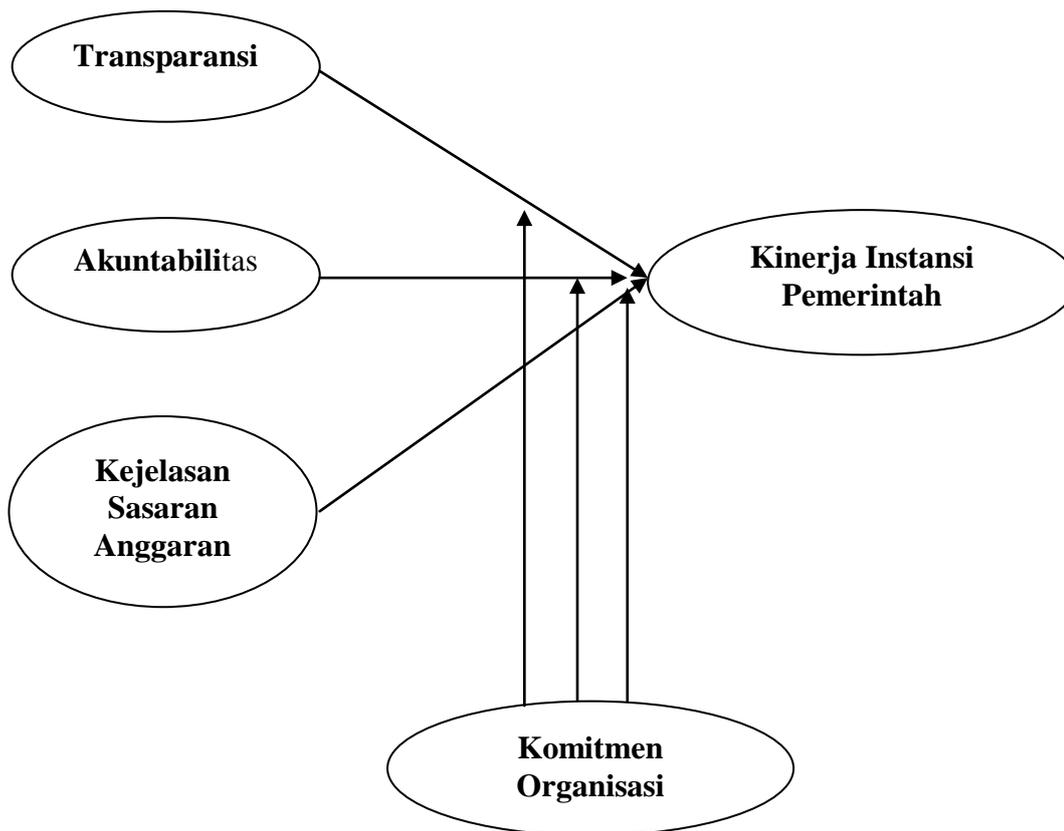
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Puji Handayati, Brilian Prastiti Andri Safitri (2020) Pengaruh transparansi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manejerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada Pemerintah Kota Batu yang menunjukkan bahwa hasil penilaian penelitian ini ditemukan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah pemerintah, sedangkan komitmen organisasi memoderasi

(memperkuat) pengaruh transparansi pada Kinerja instansi pemerintah pemerintah dengan tujuan anggaran kejelasan memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah pemerintah, serta komitmen organisasi memoderasi (memperkuat) efek kejelasan tujuan anggaran pada Kinerja instansi pemerintah pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana komitmen organisasi sebagai variabel moderating atau variabel yang memperkuat atas Kejelasan sasaran anggaran yang ada pada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan, dengan tujuan bahwasannya anggaran yang direalisasikan dapat mempengaruhi akuntabilitas serta transparansi pada Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Asahan sehingga Kabupaten Asahan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh pemerintah kepada Pemerintahan Di Kabupaten Asahan.

2.6.1 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran, yang berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Adapun kerangka konseptual yang di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1
Kerangka Konseptual

2.6.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Asahan
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Asahan
3. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Asahan

4. Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi di Kabupaten Asahan
5. Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi di Kabupaten Asahan
6. Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh keleasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi di Kabupaten Asahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode Asosiatif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Menurut Azuar (2013) mengemukakan penelitian asosiatif adalah penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan variabel lain atau apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya atau apakah suatu variabel menjadi sebab perubahan variabel lainnya.

Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang telah digunakan dan ditetapkan dengan meneliti yang menjelaskan pengaruh dari variabel independen dan dependen yang mempunyai sebab akibat (Sugiono, 2010). Pada penelitian ini variabel independen meliputi transparansi, akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja instansi pemerintahan dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Asahan, pada masa bakti 2015-2018 sebagai dasar pelaku kinerja yang ada di Pemerintahan Daerah

Kabupaten (Pembab) yang ada di kabupaten Asahan yang merupakan kabupaten yang memiliki predikat baik dalam pelaporan pemerintahannya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu dan rencana penelitian yang dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021

Tabel 3.1
Rencana Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu																				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November												
1	Pengajuan Judul																					
2	Penyusunan Proposal																					
3	Seminar Proposal																					
4	Pengumpulan Data																					
5	Pengolahan Data																					
6	Penulisan Laporan																					
7	Seminar Hasil																					
8	Penyelesaian Laporan																					
9	Sidang Tesis																					

Data Diolah

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah objek penelitian yang di teliti. Populasi adalah seluruh elemen – elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2006: 45) ,dalam penelitian ini populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk terus dipelajari , sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan (Sugiono, 2013 : 113).Pemilihan penelitian dilakukan oleh

pegawai pada Penkab di Kabupaten Asahan yang di wakili oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pelaku dalam pengawasan maupun penyusunan anggaran serta Kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perwujudan setiap kegiatan yang menuju pada penganggaran di Penkab Asahan yang berjumlah 112 org yang di wakili oleh Kepada Dinas, Kasubag Program, Kasubag Keuangan dan Bendahara dari Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Asahan.

Tabel 3.2
OPD Pada Pemerintah Daerah Asahan

No	OPD Pemerintah Provinsi Daerah Asahan	Jumlah Sampel OPD Kab.Asahan
1	Sekretaris DPRD	4
2	Inspektorat Daerah Provinsi	4
3	Dinas Kesehatan	4
4	Dinas Pendidikan	4
5	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	4
6	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
8	Dinas Sosial	4
9	Dinas Tenaga Kerja	4
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	4
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	4
12	Dinas Lingkungan Hidup	4
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4

16	Dinas Perhubungan	4
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4
25	Dinas Perkebunan	4
26	Dinas Kehutanan	4
27	Dinas Energi dan Sumber Mineral	4
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4
Jumlah		112

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini Kepala Dinas, Kepala sub Bagian keuangan, Kepala sub bagian kepegawaian dan Perencanaan anggaran, dan bendahara sebagai responden dalam penelitian ini.

3.4 Defenisi Oprasional Variabel

Devenisi oprasional variabel adalah bagaimana cara menemukan dan mengukur variabel – variabel tersebut yang terdapat dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, agar tidak menimbulkan beberapa tafsiran. Dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan skala likert yaitu skala

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Maka dari itu variabel dalam penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2010) maka variabel independen dalam penelitian ini adalah, transparansi, akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat yang akan mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel – variabel bebas (Sugiono, 2010) variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja instansi pemerintahan pada dinas di Kabupaten Asahan

c. Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai efek kontijensi yang kuat pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderating pada penelitian ini adalah komitmen organisasi yang ada pada organisasi sektor publik.

3.4.1 Defenisi Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini maka variabel – variabel yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dapat di defenisikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Oprasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Oprasional	Indikator	Skala
1	Kinerja pemerintahan (Y)	Gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Maksum, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses b. Pengeluaran (outout) c. Hasil (outcome) d. Manfaat (benefit) e. Kesejahteraan (impect) 	Ordinal
2	Trasparansi (X1)	Adalah penyediaan informasi keuangan secara terbuka agar terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, selain itu transparansi juga di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dasarnya berkaitan dengan kepentingan publik baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat di peroleh bagi yang membutuhkan. (Annisaningrum, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan informasi b. Hak untuk mendapatkan informasi 	Ordinal
3	Akuntabilitas (X2)	akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan informasi secara terbuka b. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kebijakan 	Ordinal

		entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Hamid, 2007)	publik c. Pelayanan yang memuaskan bagi publik d. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan	
	Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh apa tujuan dari anggaran yang ditetapkan secara jelas dan rinci dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat di mengerti oleh yang bertanggung jawab atas pencapaian dari sebuah anggaran (Syafrial, 2009)	a. Tujuan b. Kinerja c. Sasaran d. Tingkat kesulitam e. Koordinasi	Ordinal
4	Komitmen Organisasi (X4)	tingkat dimana pimpinan maupun staf memihak kepada organisasi tertentu yang mempunyai tujuandan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. (Griffin, 2004)	a. Proses prilaku b. Komitmen berorganisasi c. Keinginan untuk tetap berorganisasi	Ordinal

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer menurut Kuncoro (2013) data primer adalah data yang didapat dari survey lapangan dengan menggunakan semua metode yang orisinil dan dapat diolah kembali yakni kuisisioner. Adapun Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh langsung dari Dinas Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Dalam memberikan kuisisioner seputaran pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan pernyataan dan pernyataan kuisisioner yang

berisikan daftar pertanyaan yang dijawab oleh responden. Sebelum kuesioner disebarakan terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki ataupun dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Momen. Ketentuan Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,3$. Jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2011: 183).

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015)

Keterangan:

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x_i$ = jumlah pengamatan variabel X

$\sum y_i$ = jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum X_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum y_i^2)$ = jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum X_i)^2 =$ kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum y_i)^2 =$ kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$\sum x_i y_i =$ jumlah hasil kali variabel X dan Y

1. Uji Validitas Transparan (X1)

Tabel 3.4
Uji validitas Transparan

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.642	0,3	Valid
Item 2	0.625	0,3	Valid
Item 3	0.836	0,3	Valid
Item 4	0.507	0,3	Valid
Item 5	0.584	0,3	Valid
Item 6	0.780	0,3	Valid
Item 7	0.717	0,3	Valid
Item 8	0.618	0,3	Valid
Item 9	0.486	0,3	Valid
Item 10	0.570	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel diatas mengemukakan bahwa butir pernyataan yang berhubungan dengan variable transparan yang disebarkan dalam uji coba terbatas kepada 30 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 10 item. Diperoleh hasilnya, bahwa setiap item pertanyaan > r 0,3 dan dalam kategori valid.

2. Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

Tabel 3.5
Uji validitas Kompetensi Akuntabilitas

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.733	0,3	Valid
Item 2	0.882	0,3	Valid
Item 3	0.739	0,3	Valid

Item 4	0.594	0,3	Valid
Item 5	0.637	0,3	Valid
Item 6	0.854	0,3	Valid
Item 7	0.815	0,3	Valid
Item 8	0.827	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel di atas bahwa butir pernyataan yang berhubungan dengan variable Akuntabilitas yang disebarkan dalam uji coba terbatas kepada 30 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 8 item. Diperoleh hasilnya, bahwa setiap item pertanyaan dalam kategori valid.

3. Uji Validitas Kejelasan sasaran anggaran (X3)

Tabel 3.6
Uji validitas Kejelasan sasaran anggaran

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.646	0,3	Valid
Item 2	0.606	0,3	Valid
Item 3	0.719	0,3	Valid
Item 4	0.548	0,3	Valid
Item 5	0.651	0,3	Valid
Item 6	0.720	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel di atas mengemukakan bahwa butir pernyataan yang berhubungan dengan variable kejelasan sasaran anggaran yang disebarkan dalam uji coba terbatas kepada 30 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 item. Diperoleh hasilnya, bahwa setiap tem pertanyaan dalam kategori valid.

4. Uji Validitas Komitmen organisasi(M)

Tabel 3.7
Uji validitas Komitmen organisasi

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.615	0,3	Valid
Item 2	0.631	0,3	Valid
Item 3	0.646	0,3	Valid
Item 4	0.651	0,3	Valid
Item 5	0.675	0,3	Valid
Item 6	0.704	0,3	Valid
Item 7	0.598	0,3	Valid
Item 8	0.646	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel di atas mengemukakan bahwa butir pernyataan yang berhubungan dengan variable komitmen organisasi yang disebarkan dalam uji coba terbatas kepada 30 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 8 item. Diperoleh hasilnya, bahwa seluruh item pernyataan dalam kategori valid. Maka dengan demikian seluruh item pernyataan akan diikutkan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

5. Uji Validitas Kinerja (Y)

Tabel 3.8
Uji validitas Kinerja

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.628	0,3	Valid
Item 2	0.497	0,3	Valid
Item 3	0.728	0,3	Valid
Item 4	0.690	0,3	Valid
Item 5	0.683	0,3	Valid
Item 6	0.467	0,3	Valid
Item 7	0.419	0,3	Valid
Item 8	0.423	0,3	Valid

Item 9	0.628	0,3	Valid
Item 10	0.497	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel di atas mengemukakan bahwa butir pernyataan yang berhubungan dengan variable kinerja yang disebarkan dalam uji coba terbatas kepada 30 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 8 item. Diperoleh hasilnya, bahwa seluruh item pernyataan dalam kategori valid. Maka dengan demikian seluruh item pernyataan akan diikutkan dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

3.5.2 Uji Realibilitas

Sugiyono (2011: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau sebuah temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali dalam Irwana, 2010:64).

$$r = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma i^2} \right]$$

Sumber : (Juliandi, Irfan & Manurug, 2014)

Keterangan :

r = Realitas instrument

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

σi^2 = Varianstotal

Tabel 3.9
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach ' Alpha	Ketentuan Nilai r	Keterangan
Transparan (X1)	0,809	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,908		Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,880		Reliabel
Komitmen Organisasi (Y)	0,881		Reliabel
Kinerja (Y)	0,867		

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat setiap variabel nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel $> 0,6$

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Statistik yang digunakan adalah *Structural Equation Model - Partial Least Square* (SEM-PLS). *Software* untuk mengolah data penelitian ini menggunakan *SmartPLS*.

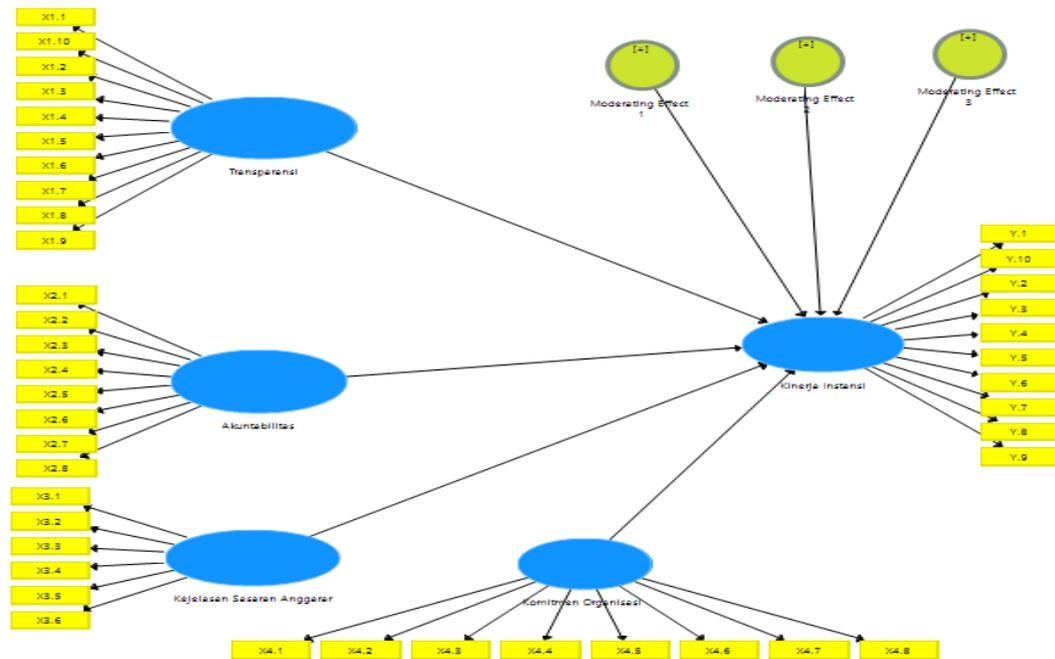
Teknik SEM-PLS memiliki keunggulan untuk menganalisis sampel-sampel yang jumlahnya kecil.

Model SEM-PLS dalam penelitian ini adalah: Analisis SEM-PLS menggunakan variabel moderator (Juliandi, 2018).

Langkah-langkah menganalisis data dari kedua model tersebut adalah sebagai berikut.

1. Analisis SEM-PLS menggunakan variabel moderator

Model analisis SEM-PLS yang menggunakan variabel moderator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2. Model SEM-PLS Bervariabel Moderator

Tahapan analisis data untuk model yang menggunakan variabel moderator di atas adalah sebagai berikut:

1.1. Analisis model pengukuran (*outer models*):

- a. Validitas dan reliabilitas konstruk (*construct reliability and validity*);
- b. Validitas diskriminan (*discriminant validity*);

1.2. Analisis model pengukuran (*inner models*):

- a. *R-Square*;
- b. *F-Square*;
- c. Pengujian hipotesis: Pengaruh variabel interaksi (Juliandi, 2018).

1.3. Uji Hipotesis

Menurut Hussein 2015, secara umum metode explanatory research adalah pendekatan metode yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian hipotesa. Menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas, hipotesis diterima bila $p < 0,05$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Instansi Pemerintahan Kabupaten Asahan

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan. Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Struktur Pemerintahan Kabupaten

Asahan pada saat ini terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kab. Asahan
2. Sekretariat DPRD Kab. Asahan
3. 1 Inspektorat
4. 17 Dinas Daerah
5. 7 Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan 3 berbentuk Kantor
6. 25 Kecamatan
7. 149 Desa
8. 27 Kelurahan

4.1.2. Tingkat Pengembalian Responden

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi pada Pemerintahan Di Kab Asahan. Sampel yang dipilih adalah pegawai di Pemerintahan Di Kab Asahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden. Dari jumlah sampel sebanyak 112 kuesioner dapat kembali. Dengan demikian sebanyak 112 kuesioner saja yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuesioner.

Tabel 4.1
Data Distribusi Sample Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan	112
2	Jumlah Kuesioner yang kembali	112
3	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	(0)
4	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(0)
Respon rate = $112/112 \times 100\%$		100%
Data yang diperoleh		112

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Table 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang disebarkan kepada responden sebanyak 112 kuesioner, namun semua kuesioner tersebut dikembalikan. Oleh karena itu data yang bisa diperoleh sebanyak 112 dengan presentase 100%

4.1.3 Deskripsi Data Responden

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang diterima dapat diketahui karakteristik responden yang akan dibahas dibawah ini meliputi: jenis kelamin, usia dalam akuntabilitas.

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

4.2.

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	84	75%
Perempuan	28	25%
Total	112	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin yang menjadi responden lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 84 orang atau 60%, sedangkan perempuan sebanyak 28 orang atau 112%.

2. Data Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
25-30	15	13%
31-35	38	34%
> 40	59	53%
Total	112	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Tabel 4.3 menunjukan bahwa responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 15 orang sebesar 13%, usia 31-35 tahun sebanyak 38 orang sebesar 34%, usia > 40 tahun sebanyak 59 orang sebesar 53%.

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA	0	0.0	0.0
Diploma	38	34.0	34.0
S1	74	66.0	66.0
Total	112	100.0	100.0

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 74 orang (66%). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan lebih banyak berpendidikan S1 dan karyawan memiliki karakteristik pendidikan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent
1-3	12	11.0	11.0
3-6	51	46.0	46.0
>6	49	43.0	43.0
Total	112	100.0	100.0

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar masa kerja responden adalah >6 tahun yaitu sebanyak 49 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan lebih banyak masa kerja lebih dari 6 tahun memiliki masa kerja cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent
1-2	23	21.0	21.0
3-4	28	25.0	25.0
>5	61	54.0	54.0
Total	112	100.0	100.0

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar masa jabatan responden adalah >5 tahun yaitu sebanyak 61 orang (54%). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan lebih banyak masa jabatan lebih dari 3-4 tahun memiliki masa jabatan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Tabel 4.7
Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Tidak Baik/ Sangat Tidak Baik/
1,81 – 2,60	Kurang Baik/ Rendah/ Sangat Rendah
2,61 – 3,40	Cukup Baik/ Sedang/
3,41 – 4,20	Baik/ Sangat Baik/
4,21 – 5,00	Sangat Baik/ Sangat Tinggi/

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Transparansi (X1)

Dalam penelitian ini, variabel transparansi diukur dengan 5 indikator antara lain 1) Keterlibatan, 2) Revisi Anggaran, 3) Memberikan Pendapat, 4) Usulan dan 5) Kontribusi Meminta Pendapat. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Transparansi yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Transparansi

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori	
		F	SB	B	CB	KB			TB
1	Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	F	24	56	23	6	1	3,83	Baik
		%							
			21	50	21	5	1		
2	Informasi telah disediakan	F	42	43	18	8	0	4,05	Baik

	secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	%							
			38	38	16	7	0		
3	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	F	23	56	24	9	0	3,83	Baik
		%							
			21	50	21	8	0		
4	Informasi yang dihasilkan oleh SKPD tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	F	23	49	31	8	1	3,76	Baik
		%							
			21	44	28	7	1		
5	Informasi yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan bersifat material	F	28	52	24	6	2	3,88	Baik
		%							
			25	46	21	5	2		
6	SKPD tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	F	34	51	23	2	2	4,01	Baik
		%							
			30	46	21	2	2		
7	Informasi yang dibutuhkan selalu tersedia ketika diminta	F	31	52	20	7	1	3,92	Baik
		%							
			28	46	18	6	1		
8	Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, missal laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan	F	41	51	16	3	1	4,14	Baik
		%							
			37	46	14	3	1		
9	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangantelah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	F	69	40	2	1	0	4,58	Sangat Baik
		%							
			62	36	2	1	0		
10	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja menyajikan	F	46	65	1	0	0	4,4	Sangat Baik
		%							

laporan keuangan secara lengkap	%	41	58	1	0	0		
Total Skor rata-rata Transparansi							4,04	Baik

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa item pernyataan mengenai Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dengan responden menjawab setuju sebanyak 69 responden (62%) hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Pemkab Asahan sudah berpengalaman atau sering berpartisipasi dalam menyusun anggaran karena pegawai yang menyusun anggaran sudah bebas dari kesalahan material dalam menyusun anggaran. Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat nilai rata-rata responden sebesar 3,22 dengan kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Asahan sudah di susun dengan transparansi.

B. Kejelasan sasaran anggaran (X2)

Dalam penelitian ini, variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan 3 indikator antara lain Tujuan, Kinerja, Sasaran, Tingkat kesulitan, Koordinasi. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Kejelasan sasaran anggaran yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Kejelasan sasaran anggaran

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori	
		F	SS	S	KK	JR			TP
1	Saya selalu menyusun anggaran sesuai dengan program kerja di masa yang akan datang	F	49	45	11	6	1	4,21	Sangat Baik
		%	44	40	10	5	1		
2	Saya menyusun anggaran selalu memperhatikan pencapaian program di tahun sebelumnya	F	31	51	26	4	0	3,97	Baik
		%	28	46	23	4	0		
3	Saya menyusun anggaran secara detail dan cara pencapaian realisasinya	F	33	53	16	9	1	3,96	Baik
		%	29	47	14	8	1		
4	Saya selalu menyusun anggaran dengan terperinci agar mudah dipahami	F	45	43	17	6	1	4,12	Baik
		%	40	38	15	5	1		
5	Saya sangat mengerti atas anggran yang dibuat	F	39	52	13	3	5	4,04	Baik
		%	35	46	12	3	4		
6	Saya mengerti dengan program dan tujuan anggaran yang sudah saya buat	F	44	52	9	6	1	4,18	Baik
		%	39	46	8	5	1		
Rata-Rata							4,08	Baik	

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa item pernyataan mengenai Saya selalu menyusun anggaran sesuai dengan program kerja di masa yang akan datang dengan responden menjawab setuju sebanyak 49 responden

(44%) dan nilai rata-rata sebesar 4,21 dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Pemkab Asahan sudah mengerti dan tujuan dari program yang sudah disusun sehingga dapat merealisasikannya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik.

C. Akuntabilitas (X2)

Dalam penelitian ini, variabel Akuntabilitas diukur dengan 4 indikator antara lain Pengelolaan informasi secara terbuka, Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik, Pelayanan yang memuaskan bagi publik, Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Akuntabilitas yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Akuntabilitas

No	Indikator / Butir Pernyataan		Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Saya dan tim selalu menyusun anggaran dengan jelas	F	35	46	18	8	4	3,88	Baik
		%	31	41	16	7	4		
2	Saya membuat perincian dana dalam setiap menyusun program agar sesuai dengan anggaran	F	32	56	16	7	1	3,99	Baik
		%	29	50	14	6	1		
3	Saya membuat anggaran secara terperinci sesuai kebutuhan, ketentuan dan peraturan dalam penyusunan anggaran	F	31	41	25	13	2	3,77	Baik
		%	28	37	22	12	2		
4	Saya menyusun laporan pertanggungjawaban	F	47	45	10	8	1	4,14	Baik

	memuat informasi yang akurat dan terpercaya	%	42	40	9	7	1		
5	Saya menyampaikan informasi anggaran dengan mudah dan dapat dipahami	F	43	42	22	2	3	4,07	Baik
		%	38	38	20	2	3		
6	Saya memahami laporan anggaran yang sudah di buat	F	32	46	28	5	1	3,92	Baik
		%	29	41	25	4	1		
Rata-Rata								3,96	Baik

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa item pernyataan mengenai Saya membuat perincian dana dalam setiap menyusun program agar sesuai dengan anggaran dengan responden menjawab setuju sebanyak 56 responden (50%) dan total dari nilai rata-rata sebesar 3,99 dengan kategori baik hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Pemkab Asahan dapat menyusun anggaran dengan yang bertujuan untuk dapat menjalankan program-program yang disusun dan dapat direalisasikan dengan baik.

4.2.1 Hasil Pengujian SEM PLS

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

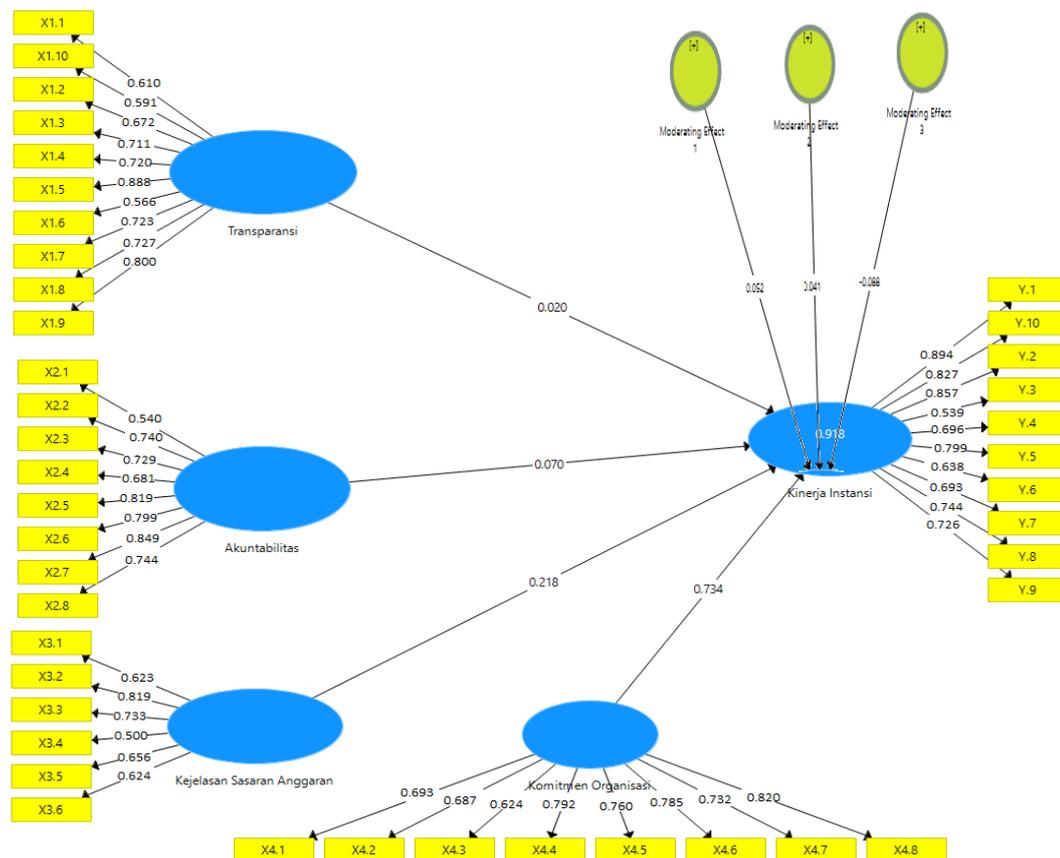
4.2.1.1 Analisis *Outer Model*

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan

pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* pada *Loading Factor* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.



Gambar 4.1
Convergent Validity

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.1 nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,5. Pada gambar 4.1 menunjukkan nilai korelasi variabel transparansi, kejelasan sasaran anggaran, Kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas menunjukkan bahwa nilai diatas 0,5 sehingga konstruk untuk beberapa variabel tidak ada yang harus dieleminasi dari model.

b. *Discriminant Validity*

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali). Berikut adalah nilai *cross loading* pada masing-masing indikator:

Tabel 4.12
Cross Loading

	Transparansi	Kejelasan sasaran anggaran	Kinerja instansi pemerintah	Komitmen Organisasi	Akuntabilitas
X1.1	0.610	0.240	0.667	0,474	0.240
X1.2	0.672	0.145	0.420	0,312	0.145
X1.3	0.711	0.319	0.647	0,378	0.319
X1.4	0.720	0.182	0.622	0,458	0.182
X1.5	0.888	0.349	0.691	0,1127	0.349
X1.6	0.566	0.294	0.657	0,345	0.294
X1.7	0.723	0.216	0.550	0,347	0.216
X1.8	0.727	0.276	0.640	0,343	0.276
X1.9	0.800	0.324	0.510	0,347	0.324
X1.10	0.591	0.257	0.587	0,241	0.257
X2.1	0.689	0.829	0.598	0,458	0.689
X2.3	0.633	0.799	0.610	0,651	0.633
X2.4	0.678	0.728	0.510	0,5112	0.678

X2.5	0.645	0.774	0.542	0,679	0.645
X2.6	0.707	0.796	0.545	0,739	0.707
X2.7	0.849	0.240	0.493	0.493	0.849
X2.8	0.744	0.145	0.570	0.570	0.744
Y.1	0.894	0.319	0.894	0.470	0.240
Y.2	0.857	0.182	0.857	0.697	0.145
Y.3	0.539	0.349	0.539	0.551	0.319
Y.4	0.696	0.294	0.696	0.467	0.182
Y.5	0.799	0.216	0.799	0.611	0.349
Y.6	0.638	0.276	0.638	0.498	0.294
Y.7	0.693	0.397	0.693	0,347	0.264
Y.8	0.744	0.551	0.744	0,467	0.385
Y.9	0.726	0.467	0.726	0,474	0.1127
Y.10	0.827	0.611	0.827	0,3112	0.225
X3.1	0.267	0.623	0.180	0,458	0.700
X3.2	0.218	0.819	0.302	0,1127	0.689
X3.3	0.116	0.733	0.119	0,345	0.563
X3.4	0.170	0.500	0.134	0,347	0.647
X3.5	0.290	0.656	0.307	0,343	0.773
X3.6	0.264	0.624	0.305	0,693	0.744
X4.1	0,405	0,522	0,347	0,687	0,328
X4.2	0,444	0,668	0,467	0,624	0,127
X4.3	0.240	0.493	0.319	0,792	0.319
X4.5	0.145	0.570	0.182	0,760	0.182
X4.6	0.319	0.470	0.349	0,785	0.349
X4.7	0.182	0.697	0.294	0,732	0.294
X4.8	0.349	0.551	0.216	0,820	0.216

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2021

Berdasarkan data Tabel 4.7 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variant*

Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (ghozali,2017)

Tabel 4.13
Average Varianed Extracted (AVE)

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	(AVE)
Kejelasan sasaran anggaran	0.925	0.939	0.658
Transparansi	0.929	0.941	0.616
Kinerja instansi pemerintah	0.867	0.897	0.523
Akuntabilitas	0.784	0.843	0.575
Komitmen Organisasi	0.780	0.747	0.583

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui nilai AVE variabel transparansi, transparansi, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas > 0,5, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian > 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel penelitian > 0,7. Maka hasil ini menunjukkan masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang tinggi.

4.1.2.2 Analisa Inner Model

Setelah memenuhi kriteria *outer model*, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pada peneltiian ini akan dijelaskan mengenai uji *goodness of fit*.

a. Uji Path Coefficient



Gambar 4.2
Path Coefficient

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Berdasarkan gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS menjelaskan bahwa nilai *path coefficient* variabel transparansi-Kinerja instansi pemerintah sebesar 0,020, kejelasan sasaran anggaran-Kinerja instansi pemerintah sebesar 0,070, transparansi-. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam model ini pengaruh transparansi dan kejelasan sasaran anggaran-Kinerja instansi pemerintah menunjukkan arah yang positif.

b. *Uji Goodness of Fit*

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program SmartPLS 3.0 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 4.18
R-Square

	R Square
Kinerja instansi pemerintah	0.918

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Pada Tabel 4.12 nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0.918 untuk variabel Kinerja instansi pemerintah. nilai tersebut menginterpretasikan bahwa variabel transparansi, kejelasan sasaran anggaran hanya mampu menjelaskan varian Kinerja instansi pemerintah sekitar 91,8%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Variabel	Coefficient	R2
X1-Y	0,384	0,15
X2-Y	0,244	0,06
X3-Y	0,254	0,06
X4-Y	0,664	0,44
X1.X4-Y	0,284	0,08
X2.X4-Y	0,299	0,09
X3.X4-Y	0,278	0,08
Total		0,918

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *t-statistic* dan nilai *p-value*. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila *t-statistic* > 1,98 (Lampiran 5) dan *P-Value* < 0,05. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 3.0:

Tabel 4.19
T-Statistics dan P-Values

	T (O/STDEV)	P Values
Transparansi->Kinerja instansi pemerintah	4.300	0.000
Akuntabilitas -> Kinerja instansi pemerintah	4.080	
Kejelasan sasaran anggaran ->Kinerja instansi pemerintah	5.811	0.000
Moderating Akuntabilitas ->Kinerja instansi pemerintah	3.230	
Moderating Transparansi->Kinerja instansi pemerintah	3.211	0.000
Moderating Kejelasan Sasaran Anggaran->Kinerja instansi pemerintah	3.209	0.000

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan dari Tabel 4.13 Nilai *t-statistic* sebesar $4.300 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis pertama “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.13. Nilai *t-statistic* sebesar $4.080 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.13. Nilai *t-statistic* sebesar $5.811 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.13 Nilai *t-statistic* sebesar $3.230 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis ketiga “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.13 Nilai *t-statistic* sebesar $4,414 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis keempat “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.13 Nilai *t-statistic* sebesar $3.211 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kelima “diterima”.

4.2 Pembahasan Penelitian

Setelah dilakukan pengujian pada hasil penelitian, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Transparansi (X1) Terhadap Kinerja instansi pemerintah (Y)

Nilai *t-statistic* sebesar $4.300 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis pertama “diterima”.

Berdasarkan tabel 4.12 nilai cross loading terbesar terdapat pada indikator revisi anggaran dengan pernyataan revisi anggaran dilakukan karena adanya anggaran yang tidak sesuai dengan program, hal ini menunjukkan bahwa setiap karyawan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan merevisi setiap anggaran apabila terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan program yang telah ditetapkan dengan tujuan tercapainya nilai realisasi dari anggaran.

Sementara untuk nilai cross loading terkecil terdapat pada indikator keterlibatan dalam penyusunan anggaran hal ini menunjukkan bahwa setiap perwakilan atau pimpinan dari divisi mempunyai pengaruh yang besar dalam proses penyusunan anggaran dan selalu terlibat dalam menyusun anggaran, hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa atasan atau dari perwakilan dari setiap divisi yang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan belum berjalan dengan baik karena setiap tahunnya anggaran pendapatan yang disusun oleh manajemen mengalami peningkatan dan tidak sesuai dengan penyusunan anggaran dengan realisasi yang dicapai, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan perencanaan belum menghasilkan kinerja material yang baik, sementara menurut (Hidayat, 2014) Perencanaan, yaitu penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara

pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2010) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja instansi pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Penganggaran Partisipatif berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja instansi pemerintah. Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja instansi pemerintah.

Kinerja organisasi akan terlihat buruk jika organisasi tersebut tidak mampu menyerap anggarannya secara optimal. Baiknya kinerja sebuah organisasi tidak terlepas dari peranan transparansinya. Terlihat dari Transparansinya yang disebut sebagai karyawan, yang memanfaatkan

kemampuan fisik dan psikisnya secara optimal demi mencapai tujuan organisasinya (Anfujatin, 2016).

Hal ini sesuai dengan penelitian Oktaliza, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi transparansi mempengaruhi Kinerja instansi pemerintah. Berlawanan dengan penelitian Rifai, dkk (2016) yang menyatakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi Kinerja instansi pemerintah.

4.2.1 Keterkaitan Kejelasan sasaran anggaran Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan dari Tabel 4.13. Nilai *t-statistic* sebesar $5.811 > 1,98$ dan *P-value* $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua “diterima”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah hal ini menunjukkan bahwa apabila setiap anggaran yang disusun memiliki kejelasan dan sesuai dengan program yang telah dibuat untuk mencapai dari tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat bahwa rata-rata responden menjawab setuju mengenai variabel kejelasan sasaran anggaran hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang sudah disusun memiliki kejelasan dalam mencapai realisasi dari program atau kegiatan perusahaan sehingga akan menghasilkan Kinerja instansi pemerintah yang semakin baik.

Komitmen dibutuhkan organisasi agar transparansi yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan pegawai dengan kejelasan sasaran anggaran yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi. Rendahnya komitmen para pegawai akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan, akibatnya terjadi ketidaksiplinan pegawai, selanjutnya tidak adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi untuk menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan hal ini menyebabkan pengembangan diri dan kreativitas pegawai menjadi menurun (Cooper dan Schindler, 2006).

Hal ini sesuai dengan penelitian Elim, dkk (2018) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Namun berlawanan dengan penelitian Harahap, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah.

2.3.3 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Nilai *t-statistic* sebesar 4.697 > 1,98 dan *P-value* 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa melalui akuntabilitastransparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis keenam “diterima”.

Kinerja organisasi akan terlihat buruk jika organisasi tersebut tidak mampu menyerap anggarannya secara optimal. Baiknya kinerja sebuah organisasi tidak

terlepas dari peranan transparansinya. Terlihat dari transparansinya yang disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memanfaatkan kemampuan fisik dan psikisnya secara optimal demi mencapai tujuan organisasinya (Anfujatin, 2016). Akuntabilitas memberi kontribusi besar terhadap Kinerja instansi pemerintah. Sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik Kinerja instansi pemerintah. Terbinanya transparansi yang kompeten mampu memberikan keputusan terbaik dalam proses penyusunan akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fajar dan Arfan (2019) yang menyatakan bahwa proses akuntabilitas mampu memediasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Harahap, dkk (2020) yang menyatakan bahwa proses akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja instansi pemerintah.

2.3.7 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran Terhadap Kinerja instansi pemerintah

Nilai *t-statistic* sebesar 4.697 >1,98 dan *P-value* 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa melalui akuntabilitas kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis ketujuh “diterima”.

Komitmen dibutuhkan organisasi agar transparansi yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan pegawai dengan kejelasan sasaran anggaran yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam

pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas memberi kontribusi besar terhadap Kinerja instansi pemerintah. Sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik Kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran yang kuat akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikir positif dan berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi organisasinya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Harahap, dkk (2020) yang menyatakan bahwa proses akuntabilitas mampu memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Fajar dan Arfan (2019) yang menyatakan bahwa proses akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis PLS menggunakan SmartPLS 3.0 dan *sobel test* pada hasil dan pembahasan penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari hasil penelitian berpengaruh positif signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis adalah:

1. Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Semakin baik transparansi yang tersedia maka semakin meningkatkan Kinerja instansi pemerintah.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran yang di susun maka semakin baik Kinerja instansi pemerintahnya.
3. Akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap Kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas anggaran maka akan semakin baik tingkat Kinerja instansi pemerintah.
4. Akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin baik tingkat Kinerja instansi pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil simpulan yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:

1. Baiknya kinerja sebuah organisasi tidak terlepas dari peranan transparansinya. Terlihat dari Transparansinya yang disebut sebagai karyawan, yang memanfaatkan kemampuan fisik dan psikisnya secara optimal demi mencapai tujuan organisasinya dan meningkatkan setiap divisi perusahaan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran agar mengetahui pencapaian atau kejelasan dari sasaran anggaran yang disusun.
2. Sebaiknya Pemkab Asahan lebih memperhatikanketerlibatan dalam penyusunan anggaran akan kebutuhan karyawan dan manajerialnya agar dapat meningkatkan komitmen para pegawai untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, akibatnya terciptanyadisiplin pegawai, selanjutnya adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi untuk menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan hal ini menyebabkan pengembangan diri dan kreativitas pegawai menjadi meningkat
3. Bagi penelitian yang akan datang
Diharapkan bagi penelitian yang akan dapat agar dapat menambahkan faktor-faktor internal maupun eksternal lainnya yang diduga dapat mempengaruhi Kinerja instansi pemerintah, memperluas objek dan populasi penelitian, dan penggunaan teknik analisis data yang lebih bervariasi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Kompak No. 13, Januari-April 2012: 37-67*.
- Allen dan Meyer. 1997. *Commitment In The Workplace (Theory, Research and Application)*. Sage Publication London
- Andi. 2019. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. 2(1):1-17*.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari *Jurnal Ekonomi (Online): <http://ovy19.wordpress.com>*.
- Arifin, Rizal, 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat dengan dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan, *Skripsi Universitas Negeri Padang, Padang*
- Auditya, Lucy dan Husaini. 2013. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1*.
- Deddi Noerdiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Dyne, V. L and Graham, J. W. 2005. Organizational Citizenship Behavior; Construct Redefinition Measurement and Validation. *AcademyManagement Journal. 37, 4, 765-802*
- Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga dan Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin. 2004. *Komitmen Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Halim. (2004) *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Holzner (2006). *Transparency in global change: the vanguard of the open society*. USA: Pittsburgh Press.
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Krina, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN, 2003.
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1-17.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik. 1st edition*. Andi. Yogyakarta 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Andi. Yogyakarta. 2006.
- Mongeri, M. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* 1(1): 1-24.
- Putra, D. 2013. Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota padang). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Salemba Empat*. 1(1): 1-30
- Sugiyono, 2005-2008. *Metode Penelitian Bisnis dan Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sumarsono, Hadi (2009). Analisis kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009*
- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis. Universitas Sumatera Utara*
- Syahrudin Rasul (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang No. 14 tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik*. Mandar Maju: Bandung

Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) *Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.*

LAMPIRAN

Uji

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.642	0,3	Valid
Item 2	0.625	0,3	Valid
Item 3	0.836	0,3	Valid
Item 4	0.507	0,3	Valid
Item 5	0.584	0,3	Valid
Item 6	0.780	0,3	Valid
Item 7	0.717	0,3	Valid
Item 8	0.618	0,3	Valid
Item 9	0.486	0,3	Valid
Item 10	0.570	0,3	Valid

validitas Transparan**Uji validitas Kompetensi Akuntabilitas**

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.733	0,3	Valid
Item 2	0.882	0,3	Valid
Item 3	0.739	0,3	Valid
Item 4	0.594	0,3	Valid
Item 5	0.637	0,3	Valid
Item 6	0.854	0,3	Valid
Item 7	0.815	0,3	Valid
Item 8	0.827	0,3	Valid

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.646	0,3	Valid
Item 2	0.606	0,3	Valid
Item 3	0.719	0,3	Valid
Item 4	0.548	0,3	Valid
Item 5	0.651	0,3	Valid
Item 6	0.720	0,3	Valid

Uji validitas Kejelasan sasaran anggaran

Uji validitas Komitmen organisasi

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.615	0,3	Valid
Item 2	0.631	0,3	Valid
Item 3	0.646	0,3	Valid
Item 4	0.651	0,3	Valid
Item 5	0.675	0,3	Valid
Item 6	0.704	0,3	Valid
Item 7	0.598	0,3	Valid
Item 8	0.646	0,3	Valid

Uji Validasi Kinerja

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R	Keterangan
Item 1	0.628	0,3	Valid
Item 2	0.497	0,3	Valid
Item 3	0.728	0,3	Valid
Item 4	0.690	0,3	Valid
Item 5	0.683	0,3	Valid
Item 6	0.467	0,3	Valid
Item 7	0.419	0,3	Valid
Item 8	0.423	0,3	Valid
Item 9	0.628	0,3	Valid
Item 10	0.497	0,3	Valid

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach ' Alpha	Ketentuan Nilai r	Keterangan
Transparan (X1)	0,809	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,908		Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,880		Reliabel
Komitmen Organisasi (Y)	0,881		Reliabel
Kinerja (Y)	0,867		

Cross Loading

	Transparansi	Kejelasan sasaran anggaran	Kinerja instansi pemerintah	Komitmen Organisasi	Akuntabilitas
X1.1	0.610	0.240	0.667	0,474	0.240
X1.2	0.672	0.145	0.420	0,312	0.145
X1.3	0.711	0.319	0.647	0,378	0.319
X1.4	0.720	0.182	0.622	0,458	0.182
X1.5	0.888	0.349	0.691	0,1127	0.349
X1.6	0.566	0.294	0.657	0,345	0.294
X1.7	0.723	0.216	0.550	0,347	0.216
X1.8	0.727	0.276	0.640	0,343	0.276
X1.9	0.800	0.324	0.510	0,347	0.324
X1.10	0.591	0.257	0.587	0,241	0.257
X2.1	0.689	0.829	0.598	0,458	0.689
X2.3	0.633	0.799	0.610	0,651	0.633
X2.4	0.678	0.728	0.510	0,5112	0.678
X2.5	0.645	0.774	0.542	0,679	0.645
X2.6	0.707	0.796	0.545	0,739	0.707
X2.7	0.849	0.240	0.493	0,493	0.849
X2.8	0.744	0.145	0.570	0,570	0.744
Y.1	0.894	0.319	0.894	0,470	0.240
Y.2	0.857	0.182	0.857	0,697	0.145
Y.3	0.539	0.349	0.539	0,551	0.319
Y.4	0.696	0.294	0.696	0,467	0.182
Y.5	0.799	0.216	0.799	0,611	0.349
Y.6	0.638	0.276	0.638	0,498	0.294
Y.7	0.693	0.397	0.693	0,347	0.264
Y.8	0.744	0.551	0.744	0,467	0.385
Y.9	0.726	0.467	0.726	0,474	0.1127
Y.10	0.827	0.611	0.827	0,3112	0.225
X3.1	0.267	0.623	0.180	0,458	0.700
X3.2	0.218	0.819	0.302	0,1127	0.689
X3.3	0.116	0.733	0.119	0,345	0.563
X3.4	0.170	0.500	0.134	0,347	0.647
X3.5	0.290	0.656	0.307	0,343	0.773
X3.6	0.264	0.624	0.305	0,693	0.744
X4.1	0,405	0,522	0,347	0,687	0,328
X4.2	0,444	0,668	0,467	0,624	0,127
X4.3	0.240	0.493	0.319	0,792	0.319
X4.5	0.145	0.570	0.182	0,760	0.182
X4.6	0.319	0.470	0.349	0,785	0.349
X4.7	0.182	0.697	0.294	0,732	0.294
X4.8	0.349	0.551	0.216	0,820	0.216

Average Varianed Extracted (AVE)

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	(AVE)
Kejelasan sasaran anggaran	0.925	0.939	0.658
Transparansi	0.929	0.941	0.616
Kinerja instansi pemerintah	0.867	0.897	0.523
Akuntabilitas	0.784	0.843	0.575
Komitmen Organisasi	0.780	0.747	0.583

R-Square

	R Square
Kinerja instansi pemerintah	0.918

Variabel	Coefficient	R2
X1-Y	0,384	0,15
X2-Y	0,244	0,06
X3-Y	0,254	0,06
X4-Y	0,664	0,44
X1.X4-Y	0,284	0,08
X2.X4-Y	0,299	0,09
X3.X4-Y	0,278	0,08
Total		0,918

T-Statistics dan P-Values

	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Transparansi->Kinerja instansi pemerintah	4.300	0.000
Akuntabilitas -> Kinerja instansi pemerintah	4.080	
Kejelasan sasaran anggaran ->Kinerja instansi pemerintah	5.811	0.000
Moderating Akuntabilitas ->Kinerja instansi Pemerintah	3.230	
Moderating Transparansi->Kinerja instansi Pemerintah	3.211	0.000
Moderating Kejelasan Sasaran Anggaran->Kinerja instansi pemerintah	3.209	0.000



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar dibubarkan
mor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jumat , tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

dengan catatan wajib memperbaiki:

- BAB 1** : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab 2** : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negeri
- Perbaiki Bab 3** : Perbaiki populasi dan sampel
Penggunaan Mandeley pada Daftar Pustaka

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar doebukan mor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jumat , tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

dengan catatan wajib memperbaiki:

- BAB 1** : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab 2** : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negri
- Perbaiki Bab 3** : Perbaiki populasi dan sampel
Penggunaan Mandeley pada Daftar Pustaka

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar doebukan mor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jumat , tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

dengan catatan wajib memperbaiki:

- BAB 1** : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab 2** : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negri
- Perbaiki Bab 3** : Perbaiki populasi dan sampel
Penggunaan Mandeley pada Daftar Pustaka

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pemanding,

Dr. Hj. MAYA SARI , S.E., Ak, M.Si., CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

silakan menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya.

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	8 Agustus 2021	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis - Deskripsi Variabel Penelitian diuraikan dengan jelas untuk masing-masing variabel	
2	16 Agustus 2021	- Pembahasan dilengkapi, tambahkan deskripsi variabel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung pembahasan.	
3	21 Agustus 2021	- Pembahasan hasil penelitian dipertajam kembali.	
4	28 Agustus 2021	- Lengkapi abstrak penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	
5	2 September 2021	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 2 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

silakan menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya.

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	8 Agustus 2021	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis - Deskripsi Variabel Penelitian diuraikan dengan jelas untuk masing-masing variabel	
2	16 Agustus 2021	- Pembahasan dilengkapi, tambahkan deskripsi variabel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung pembahasan.	
3	21 Agustus 2021	- Pembahasan hasil penelitian dipertajam kembali.	
4	28 Agustus 2021	- Lengkapi abstrak penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	
5	2 September 2021	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 2 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

silakan menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya.

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	8 Agustus 2021	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis - Deskripsi Variabel Penelitian diuraikan dengan jelas untuk masing-masing variabel	
2	16 Agustus 2021	- Pembahasan dilengkapi, tambahkan deskripsi variabel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung pembahasan.	
3	21 Agustus 2021	- Pembahasan hasil penelitian dipertajam kembali.	
4	28 Agustus 2021	- Lengkapi abstrak penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	
5	2 September 2021	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 2 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris,

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, CA

JRAK - Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis
Print ISSN : 2407-828X | e-ISSN : 2407-8298

Letter of Accepted (LOA)

No. 517/03/SK-JRAK/PLB/X/2022

Dewan Editor Jurnal JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis telah menerima artikel :

Nama : Ade Irma, Eka Nurmala Sari, Widia Astuty
Judul : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan **JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis** dan akan diterbitkan pada jurnal JRAK Volume 10 Nomor 2, Juli Tahun 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 13 Oktober 2022
Ketua Dewan Editor JRAK



Budi Harto, S.E., M.M., PIA
NIDN. 0418097903

KAMPUS UTAMA

Jl. Pahlawan No.59,
Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler,
Kota Bandung Jawa Barat 40123

 www.plb.ac.id

 +62 812 9078 0050

 (022) 2506 500

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS CIMAH**

Jl. Terusan No.164,
Cimahi, Kec. Cimahi Tengah,
Kota Cimahi,
Jawa Barat 40525

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS PEKANBARU**

Jl. Taman Sari No.11,
Tengkerang Selatan, Bukit Raya,
Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya,
Kota Pekanbaru, Riau 28125

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS PADANG**

Jl. Pattimura No. 11 C-D,
Kp. Jaa, Kec. Padang Barat,
Kota Padang,
Sumatera Barat, 25116

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS CIREBON**

Jl. Tuparev No.514,
Pilangsari, Kedawung,
Cirebon, Jawa Barat 45153

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS TASIKMALAYA**

Jalan Ir. H. Juanda KM. 2 No. 106,
Panglayungan, Kec. Cipedes,
Tasikmalaya, Jawa Barat 46151

**POLITEKNIK LP3I
KAMPUS LANGSA**

Jalan Paya Bujok Seuleumak,
Langsa Baro, Kota Langsa,
Aceh 24355

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis :PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
KEJELASANSASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Di Kabupaten
Asahan)

Di setujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan,

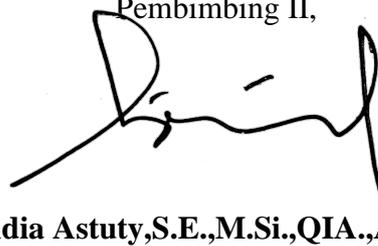
2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

(Dr. Eka Nurmala sari, S.E.,Ak.,CA)

Pembimbing II,



(Dr. Widia Astuty,S.E.,M.Si.,QIA.,Ak.,CA.,CPA)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Senin, tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

- Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)
- 1 Bab I : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kinerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab II : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negeri
- 3 Bab III : Pengambilan populasi dan sampel Kepala Dinas, Kasubak Program dan bendahara.
Tidak Menggunakan Mandelley Pada Daftar Pustaka

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Senin, tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

- Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)
- 1 Bab I : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab II : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negeri
- 3 Bab III : Pengambilan populasi dan sampel Kepala Dinas, Kasubak Program dan bendahara.
Tidak Menggunakan Mandelley Pada Daftar Pustaka

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Senin, tgl. 14 Juni 2021 telah dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan) Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

- Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)
- 1 Bab I : Tabel realisasi anggaran harus diambil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Turunkan data indikator kinerja yang berkaitan dengan instansi kerjanya (Pengawasan,Perencanaan,Transparansi) dan kaitkan dengan indikator kejelasan sasaran anggaran dan hubungkan dengan kinerja instansi Pemerintah
- Bab II : Artikel dan jurnal tambahkan dari luar negeri
- 3 Bab III : Pengambilan populasi dan sampel Kepala Dinas, Kasubak Program dan bendahara.
Tidak Menggunakan Mandelley Pada Daftar Pustaka

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :

Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Transpalansi, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasarn Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	1/8/21	- perbaiki judul di bab 3 lihat kolom skala pengaruh di tabel operasional variabel	[Signature]
2		- perbaiki tabel dan tanggap resp dan	
3		- lihat bentuk data persentase berapa jumlah instansi yang mempunyai SK, B, dan TB. dan ada	[Signature]
4			
5	1/9/21	- pembahasan materi harus di perbaiki lagi, lihat variabel yang berpengaruh namun lebih pengaruhnya, jelaskan ada apa	[Signature]
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....
Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,
.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Transpalansi, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasarn Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	1/9/21	- perbaiki judul di bab 3 lihat kolom skala pengaruh di tabel operasional variabel	
2		- perbaiki tabel dan tanggap resp dan	
3		- lihat hasil data persentase berapa jumlah instansi yang memiliki SK, B, dan TB. dan ada	
4			
5	1/9/21	- pembahasan materi harus di perbaiki lagi, lihat variabel yang berpengaruh namun lihat pengaruhnya, jelaskan ada apa	
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....
Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,
.....



UMSU

Unggul | Cordat | Terdekatnya

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh
manajemen yang baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Transpalansi, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasarn Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	13/9 21	perbahasan materi tentang tujuan penelitian juga apakah hasil penelitian sudah menjawab dari fenomena masalah, penelitian di	
2		perbahasan	
3			
4	15/9 21	keimpulan, buany kch signi plan	
5		abstrak untuk hasil di buat perumusan	
6	19 21	aman harus real, dan nyata	

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....
Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,
.....



UMSU

Unggul | Cordat | Terdekatnya

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh ketepatan pelaksanaannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
 NPM : 1920050009
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Tesis : Pengaruh Transpalansi, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasarn Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	13/9 21	pembahasan masih kurang pujan jelaskan juga apa hasil	
2		penelitian sudah menjawab dari fenomena masalah, jelaskan di	
3		pembahasan	
4	15/9 21	kesimpulan, buang kata signi fikan	
5		abstrak untuk hasil di buat perumusan	
6	19/9 21	gambar harus real, dan nyata	

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....
Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,
.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor publik
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja
Instansi Pemerintah Dengan Komitmen organisasi
Sebagai Variabel Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	16/10 ²¹	- Pembahasan lebih di perincayan pembahasan dan deskripsi data	3/
2		dan pembahsan, masalah nilai Cross loading.	
3	16/10 ²¹	- Saran lebih lebih umum lebih tanggap respon.	3/
4	16/10 ²¹	- Daftar pustaka, status dosen umum Mahir	3/
5	16/10 ²¹		
6	16/10 ²¹	See jenis konsep dan sem. huni	3/

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Ade Irma
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor publik
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja
Instansi Pemerintah Dengan Komitmen organisasi
Sebagai Variabel Moderating

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	16/10 ²¹	- Pembahasan lebih di perincian kelebihan dan deskripsi data	3/
2		dan perubahan, masalah nilai Cross loading.	
3	16/10 ²¹	- Saran lebih lebih umum lebih terapan nyata.	3/
4	16/10 ²¹	- Daftar pustaka, status dosen umum Mahir	3/
5	16/10 ²¹		
6	16/10 ²¹	see jenis konsep dan sem. huni	3/

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

Saya mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian demi memenuhi salah satu syarat memperoleh Magister Akuntansi yang dilakukan pada pemerintahan kabupaten asahan. Hasil angket ini tidak dipublikasikan melainkan untuk kepentingan data semata.

A. Data Responden

No. Responden :
 Sub Unit Kebunan :
 Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)
 Umur : _____ tahun
 Lama Bekerja : _____ tahun _____ bulan
 Jabatan :
 Pendidikan : D3, S1- S2- S3 (coret yang tidak perlu)

B. Petunjuk Pengisian

Dalam menjawab semua pertanyaan dibawah ini, Bapak/Ibu dipersilahkan memilih satu jawaban yang telah tersedia dengan pendapat Bapak/Ibu yang paling di anggap sesuai. Dengan opsi jawaban sebagai berikut :

1. SB/SM/SP : Sangat baik/Sangat Memadai/Sangat Pernah/Sangat Rendah = 5
2. B/M/P : Baik/Memadai/Pernah/Rendah = 4
3. CB/CM/CP : Cukup baik/Cukup Memadai/ Cukup/Cukup Rendah = 3
4. KB/KM/KP : Kurang baik/ Kurang Memadai/Kurang/Kurang Rendah = 2
5. TB/TM/TP : Tidak baik/Tidak Memadai/Tidak Pernah/Sangat Rendah = 1

Berilah tanda “ceklist” () pada kolom jawaban yang saya pilih

1. Transparansi Akuntansi

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
		F	SB	B	CB	KB		
1	Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	F						
		%						
2	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	F						
3	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	F						
		%						
	Informasi yang dihasilkan oleh SKPD tempat saya bekerja	F						

4	tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	%							
5	Informasi yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan bersifat material	F							
		%							
6	SKPD tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	F							
7	Informasi yang dibutuhkan selalu tersedia ketika diminta	F							
		%							
8	Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan	F							
		%							
9	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	F							
		%							
10	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap	F							
	Total Skor rata-rata Transparansi								

2. Kinerja Instansi

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Rata-rata Jawaban	Kategori
			SS	S	KK	JR		
1	Saya selalu menyusun anggaran sesuai dengan program kerja di masa yang akan datang	F						
		%						
2	Saya menyusun anggaran selalu memperhatikan pencapaian program di tahun sebelumnya	F						
		%						
3	Saya menyusun anggaran secara detail dan cara pencapaian Realisasinya	F						
		%						
4	Saya selalu menyusun anggaran dengan terperinci agar mudah dipahami	F						
		%						
5	Saya sangat mengerti atas anggaran yang dibuat	F						
		%						
6	Saya mengerti dengan program dan tujuan anggaran yang sudah saya buat	F						
		%						
Rata-Rata								

3. Komitmen Organisasi

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ade Irma

Npm : 1920050009

Program Study : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating (Study Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

Menyatakan bahwa

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan tesis atau usaha saya sendiri, baik dalam penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian tesis.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut Menjiplak plagiat hasil karya penelitian orang lain. Mereka Nyata data angket, wawancara, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan proyek Proposal Makala Skripsi dan penghujukan Dosen Pembimbing dari Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan ,

Juli 2023

Penulis

Ade Irma
1920050004



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Integrasi nilai ke agar mahasiswa
lebih bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Jum'at, tgl. 29 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Bab I Memperjelas dan mempertajam latar belakang pada Bab 1
2. Bab IV Memperbaiki tabel responden dan memperjelas sampel pada populasi penelitian
3. BAB V Memperbaiki rangkuman
Menggunakan mandelay pada penulisan daftar pustaka
Menggunakan artikel jurnal yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis

Penguji/Pembahas II

Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas,

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Penguji/Pembahas II

Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Jl. Denal No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, 30 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : ADE IRMA
NPM : 1920050009
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Study Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Asahan)

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : *perbaiki pembahasan hasil dan kesimpulan lagi.*

Pembimbing II :

Penguji I :

Penguji II : *Teri ditambah keuikan Indikator Variabel*

Penguji III :

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA
Pembimbing I
- 2 Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.
Pembimbing II
- 3 Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Penguji I
- 4 Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.
Penguji II
- 5 Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.
Penguji III